

**PERANAN SEKTOR PERIKANAN WILAYAH PESISIR DAN
NON PESISIR KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PDRB**

TESIS

**HELENA YUSFIK
0706299183**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009**

**PERANAN SEKTOR PERIKANAN WILAYAH PESISIR DAN
NON PESISIR KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PDRB**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister

**HELENA YUSFIK
0706299183**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Helena Yusfik

NPM : 0706299183

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Helena Yusufik
NPM : 0706299183
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Peranan Sektor Perikanan Wilayah Pesisir Dan
Non Pesisir Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Dan
Pengaruhnya Terhadap PDRB

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Suahasil Nazara

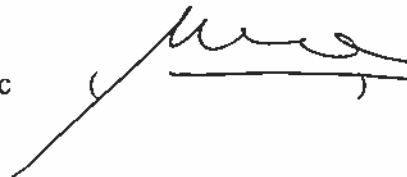


(Suahasil Nazara)

Penguji : Prof. Dr. Mangara Tambunan



Penguji : R.H. Achmadi, SE.,M.Soc.Sc



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Syukur, Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Seiring terselesaikannya tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai kritik dan saran dikemudian hari. Selain itu, tesis ini juga merupakan hasil karya dan kerjasama dari banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin hanyalah sebuah nama. Oleh sebab itu perkenankan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, atas bimbingan dan bantuannya kepada:

1. DR. B. Raksaka Mahi, selaku Ketua Program MPKP UI
2. Dra. Hera Susanti, M.Sc selaku Sekretaris Program MPKP UI
3. DR. Suahasil Nazara, selaku dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Tanpa itu semua, tesis ini tidak akan berarti dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Suami dan Anakku M. Ridho Jauhari dan Shofiyya Qurrota A'yun, terima kasih atas do'a, support dan pengorbanannya selama pendidikan di MPKP FE UI.
5. Teman – teman MPKP Kelas Bappenas Angkatan XVII Pagi Salemba, yang telah sama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan ini.
6. Keluarga di Padang, Cirebon dan Bogor yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a yang tidak mungkin penulis bisa membalasnya.
7. Bagian Monev dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah banyak memberikan dukungan sehingga penulis bisa melanjutkan studi ini.

Depok, Januari 2009
Helena Yusfik

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : HELENA YUSFIK
NPM : 0706299183
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Sektor Perikanan Wilayah Pesisir dan NonPesisir Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Pengaruhnya Terhadap PDRB

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

di : Jakarta,

Pada Tanggal : Januari 2009

Yang menyatakan ,



(HELENA YUSFIK)

ABSTRAK

Nama : Helena Yusfik
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Peranan Sektor Perikanan Wilayah Pesisir dan NonPesisir
Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Pengaruhnya
Terhadap PDRB

Tesis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir di pulau Jawa. Dan menentukan variasi sektor perikanan terhadap variasi PDRB. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 104 Kabupaten/Kota di pulau Jawa dari tahun 2002-2005 diolah dengan bantuan software Eviews 5.1. Metode yang digunakan adalah estimasi dengan data panel menggunakan *dummy variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi PDRB di wilayah jawa. Sedangkan share perikanan berkorelasi negatif mempengaruhi PDRB di wilayah Jawa. Selain itu diperoleh bahwa daerah pesisir utara lebih menghasilkan output/PDRB lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan yang paling rendah adalah wilayah pesisir selatan Jawa.

Kata Kunci:
PDRB, dummy data panel, share perikanan

ABSTRACT

Name : Helena Yusufik
Study Program : Magister of Planning and Public Policy
Title : Share of Fisheries sector of Seaboard and Non Seaboard area of City/regency in Jawa and it's Effect to GRDP

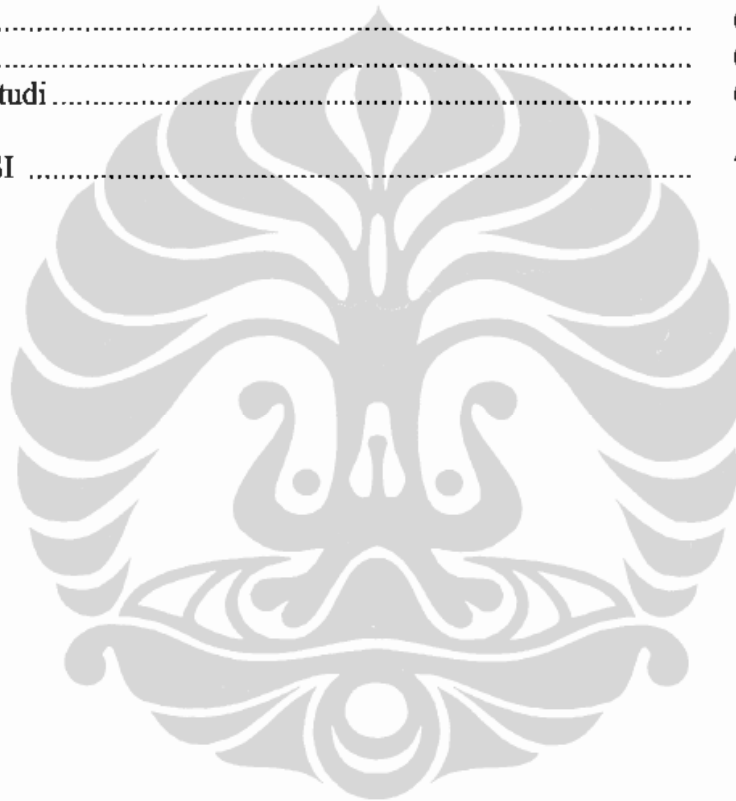
The thesis aim to find out whether the growth of economics in the coastal area is higher than the non coastal area and the factors which influenced them. And to find variation share of fisheries toward GRDP. This research is conducted by using the panel data which include 104 district area/city in Java from 2002-2005. It processed by using the software program called Eviews 5.1. The method of this research is estimating the set data by using the dummy variable. The results showed that Government Expenditure, Labors had positive correlation and it is significantly influencing the "PDRB" in Java, meanwhile the share of fishery had negative correlation in influencing the PDRB in Java. In addition, it opened the information that the north-coastal-area produce more output (PDRB) than other coastal areas. And the lowest production of output was found in the south-coastal area.

Key word :
PDRB, dummy variable, share of fishery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Hipotesis	5
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
1.8 Kerangka Pikir Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pembangunan Ekonomi	9
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2.2 Teori Ekonomi Klasik.....	15
2.2.3 Pendekatan Neo-Keynes	16
2.2.4 Pendekatan Neo Klasik.....	20
2.3 Peran Pemerintah Dalam Perekonomian	24
2.4 Ketengakerjaan	27
2.5 Wilayah Pesisir	28
III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Metode Deskriptif	30
3.2 Spesifikasi Model	34
3.2.1 Model Regresi Majemuk Data Panel.....	34
3.2.2 Rancangan Model.....	35
3.3 Teknik Estimasi	38
3.4 Populasi Penelitian	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
IV Profil Perekonomian Wilayah Pesisir di Pulau Jawa.....	42
4.1 Kondisi Perekonomian di Pulau Jawa	42
4.2 Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa.....	45

4.3 Struktur Perekonomian Wilayah Pesisir	47
4.4 Pengeluaran Pembangunan	50
4.5 Ketenagakerjaan	52
4.6 Sub Sektor Perikanan	54
V PEMBAHASAN	58
5.1 Uji Parsial, Uji Model dan Uji Koefisien Koefisien Determinasi	58
5.2 Metode <i>Dummy</i> Dengan Beberapa Variabel Kualitatif	60
5.3 Model Dengan Menggunakan Metode Variabel <i>Dummy</i>	62
VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	68
6.3 Keterbatasan Studi	68
DAFTAR REFERENSI	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi PDRB Wilayah Pesisir Dibandingkan Dengan Wilayah Non Pesisir Tahun 2002-2005 (persen).....	4
Tabel 4.1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Non Pesisir Tahun 2002 -2006	43
Tabel 4.2	PDRB per kapita Terendah dan Tertinggi dari masing-masing wilayah tahun 2002-2006	46
Tabel 4.3	Rata-rata Persentase Struktur Perekonomian di Pulau Jawa tahun 2002-2006	47
Tabel 4.4	Rata-rata Persentase Struktur Perekonomian di Pulau Jawa tahun 2002-2006	49
Tabel 4.5	Jumlah Perusahaan Industri Dan Tenaga Kerja Serta Nilai Produksi Menurut Sub Sektor Industri di Kota Kediri Tahun 2002	50
Tabel 4.6	Anggaran Pembangunan Terendah dan Tertinggi dari masing-masing Wilayah tahun 2002-2006	51
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Tahun 2002-2006 (Jiwa).....	52
Tabel 4.8	Pertumbuhan Tenga Kerja Terendah dan Tertinggi dari masing-Masing wilayah tahun 2002-2006	53
Tabel 4.9	Share Sub Sektor Perikanan di Pulau Jawa Selama Tahun 2002-2006 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000.....	54
Tabel 4.10	Share Sub Sektor Perikanan Terendah dan Tertinggi dari masing-masing Wilayah tahun 2002-2006	55
Tabel 5.1	Hasil Estimasi Terhadap Variabel-Variabel Penentu PDRB Kab/ Kota Di Jawa Tahun 2002-2006	59
Tabel 5.2	Hasil Estimasi Dengan Menggunakan Metode <i>Dummy</i>	61
Tabel 5.3	Hasil Estimasi Dengan Meggunakan Variabel <i>Dummy</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian	8
Gambar 2.1 Pertumbuhan Output pada Model <i>Neoclassical</i>	23
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Non Pesisir di Jawa	42
Gambar 4.2 Perkembangan PDRB per kapita di Pulau Jawa	46
Gambar 4.3 Struktur Perekonomian Wilayah Pesisir dan Non Pesisir di Pulau Jawa Tahun 2002 – 2006	48
Gambar 4.4 Perbandingan Pengeluaran Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pesisir di Jawa	50
Gambar 4.5 Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2002 -2005 di Pulau Jawa...	53
Gambar 4.6 Share Perikanan Terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2002-2006	55
Gambar 4.7 Sebaran Nilai PDRB di Pulau Jawa (dalam trilyun rupiah)	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Hasil Penelitian	73
Lampiran 2	Hasil Pengujian OLS.....	85
Lampiran 3	Hasil Pengujian dengan Metode <i>dummy</i>	86
Lampiran 4	Hasil Pengujian dengan Menggunakan Metode Variabel <i>Dummy</i>	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu variabel yang dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan adalah pendapatan perkapita, yang merupakan tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi dan standar hidup penduduk suatu negara (Blanchard, 2006). Menurut Djojohadikusumo (1994) terdapat perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dari sekedar peningkatan produksi yaitu perubahan pada komposisi produksi, perubahan pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pada saat ini proses pembangunan suatu bangsa tidak lagi dapat dipahami secara terbatas pada pertumbuhan ekonomi semata. Selain itu untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan suatu bangsa adalah kemiskinan. Jika pembangunan manusia dipahami sebagai kumpulan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kemiskinan justru dipahami harus bergerak ke arah yang berlawanan (penurunan angka kemiskinan). (Harmadi, 2007)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dan perubahan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan peningkatan pendapatan dalam arti meningkatkan pemerataan pendapatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nyata (Iskandar, 1993)

Terbukti ketika di Indonesia terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terjadi, kurang diikuti dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Beberapa daerah mengalami tingkat kemajuan kesejahteraan yang berarti, sedangkan disisi lain ada propinsi yang hampir tidak mengalami kemajuan kesejahteraan. Konsentrasi aktivitas ekonomi terbesar berada pada daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan, hal ini juga mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dari tahun ke tahun, data Produk Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, karena dengan menggunakan PDRB atas harga konstan pengaruh perubahan harga terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto telah dihilangkan.

Karakteristik daerah seperti geografis, kondisi alam, budaya kerja adalah beberapa hal yang dapat pula mempengaruhi disparitas ekonomi antar daerah. Syafrizal (2000) dengan menggunakan indeks Williamson menyatakan ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia Bagian Barat (IBB) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi daerah rata-rata di Indonesia. Sehingga sumber daya alam sesungguhnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Negara yang berbatasan langsung dengan laut umumnya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti: Kanada, China, Jepang dll. Yao and Zhang (2001) menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal

dari wilayah- wilayah pusat pertumbuhan. Dari tulisan ini diperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi terkonsentrasi pada wilayah pantai timur di China. Semakin jauh wilayahnya dari pantai maka pertumbuhan ekonomi makin melambat. Pengembangan wilayah pesisir China berhasil dilakukan sejak awal tahun 1988 dengan melakukan kebijakan yang berorientasi keluar atau orientasi pendapatan melalui ekspor. (Yang, 1991)

Sedangkan di Indonesia masyarakat pesisir sebagai bagian masyarakat yang secara geografis merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir berada di bawah garis kemiskinan. Ini berarti masyarakat pesisir Indonesia pada umumnya tidak menikmati dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari jumlah masyarakat nelayan di Indonesia 16,5 juta jiwa, sekitar 32% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tingkat pendapatan setiap orang per bulan rata-rata Rp 300.000 (Kompas, 7 September 2005:22).

Menurut Saptarini (1995) tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir, maka wilayah pesisir ditentukan berdasarkan batas ekologis yaitu kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut, intrusi air laut. Batas administrasi: yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km, 20 km dan seterusnya dari garis pantai). Batas perencanaan yaitu tergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan pesisir. Misalnya kawasan pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan memberikan dampak di kawasan pesisir.

Pulau Jawa terdapat tiga wilayah pesisir yaitu pesisir utara, pesisir selatan dan daerah non pesisir. Di Jawa Barat terdiri dari 26 Kabupaten, yang 6 diantaranya berada di pesisir utara, 5 berada di pesisir selatan dan 11 kab/kota tidak berada di kawasan pesisir. Provinsi Jawa Tengah mempunyai 13 Kab/Kota yang berada di Pesisir Utara, di wilayah selatan 3 kab/kota dan 20 Kab/kota yang tidak berada di daerah pesisir. Demikian pula dengan Jawa Timur yang mempunyai 14 Kab/Kota di Pesisir Utara, 6 di wilayah selatan dan tidak berada di wilayah pesisir sebanyak 16 kab/kota. Banten sebagai provinsi terbaru mempunyai 3 Kab/Kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa sedangkan 2

Kabupaten lain berada di pesisir selatan pulau Jawa dan berada di tengah-tengah hanya 1 kota.

Selain itu ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan sekitar 80 persen aktivitas pembangunan seperti pembangunan industri baik secara sektoral dan regional yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat diantaranya budidaya perikanan, wisata bahari, industri, pertambangan lepas pantai, pelabuhan laut, dan reklamasi pantai untuk perluasan kota berada di kawasan pesisir. (DKP, 2006)

Di sisi lain menurut (Crawford *et all*, 1999) bahwa ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pesisir umumnya memiliki kualitas yang hidup rendah sedangkan penelitian lain membuktikan bahwa di Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara bahwa nelayan di daerah ini pendapatannya tidak rendah .

Salah satu masalah yang paling krusial adalah kemiskinan masyarakat nelayan sebagaimana banyak diungkapkan melalui berbagai studi dan penelitian. Dari jumlah masyarakat nelayan di Indonesia 16.420.000 jiwa hidup dan tersebar pada 8.090 desa pesisir. Mereka terdiri atas kelompok nelayan 4.015.320 jiwa, pembudidaya perairan dan 2.671.400 jiwa, dan kelompok sosial lainnya 9.733.,280 jiwa. Persentase yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 32,14 % atau 5.254.400 jiwa dari total masyarakat pesisir. (Direktorat PMP, April 2006). Persentase kemiskinan masyarakat pesisir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan nasional yang sekarang mencapai 17,75 % dari total 222 juta penduduk Indonesia (BPS 2006).

Dengan melihat rata-rata PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir di Pulau Jawa selama 5 tahun terakhir (2000-2006) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Distribusi PDRB Wilayah Pesisir Dibandingkan Dengan Wilayah Non Pesisir
Tahun 2002-2005 (persen)

Propinsi	2002	2003	2004	2005	2006
Pesisir Utara	37,54	37,51	37,51	37,65	37,76
Pesisir Selatan	16,02	15,94	15,82	15,74	15,61
Non Pesisir	46,44	46,55	46,66	46,61	46,64

Sumber : BPS, diolah kembali

Jika dilihat dari proporsi PDRB diatas, maka ketiga wilayah terlihat selama lima tahun terakhir proporsinya terhadap keseluruhan pulau Jawa tidak mengalami perubahan yang berarti. Wilayah Non Pesisir mempunyai proporsi paling besar karena wilayah ini mempunyai kabupaten/kota yang paling banyak dibandingkan dua wilayah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Di lain pihak pembangunan yang berorientasi regional harus dipahami secara kewilayahan pula sebagai satuan geografi yang mempunyai ciri spesifik.

1.2 Perumusan Masalah

Secara geografis wilayah pesisir utara dan selatan Jawa yang memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing wilayah tersebut terdapat mempunyai perbedaan tingkat pembangunan secara sektoral. Antara wilayah pesisir utara, pesisir selatan dan non pesisir terdapat perbedaan tingkat pembangunan.

Sehingga diperoleh perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan non pesisir tersebut?
- b. Apakah variasi sektor perikanan bisa menentukan variasi PDRB?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap :

- a. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di wilayah pesisir maupun non pesisir di Pulau Jawa.
- b. Menentukan variasi sektor perikanan terhadap variasi PDRB

1.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesa adalah sebagai berikut :

- a. Diduga wilayah pesisir utara di Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi berbeda secara signifikan dibandingkan wilayah non pesisir dan selatan pulau Jawa.
- b. Variabel-variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir
- c. Variabel rasio subsektor perikanan diduga memberi kontribusi untuk peningkatan output di wilayah pesisir dan non pesisir

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh terhadap Kabupaten/kota di Pulau Jawa dalam kurun waktu tahun 2002-2006. Tidak dibedakan antara Kabupaten dan Kota, karena diasumsikan variasi dari perkembangan masing-masing wilayah bersifat dinamis.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di wilayah tentang proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan hasil-hasil yang diperoleh, sehingga menjadi bahan strategis bagi pengambilan keputusan berikutnya.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap program-program pembangunan bidang pesisir, terutama dibidang ekonomi yang telah dijalankan.
3. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan program-program pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang tertinggal pertumbuhannya.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Hipotesis, Kerangka Pemikiran, Ruang Lingkup, dan Manfaat.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan Teori Pertumbuhan Neo klasik Tanpa Teknologi, Teori Pertumbuhan Neo Classik Dengan Teknologi (Exogenous), Teori Pertumbuhan Dengan Teknologi (Endogenous), Pengeluaran pemerintah, Tenaga kerja dan Subsektor perikanan

BAB III METODOLOGI

Yang meliputi data dan sumber data yang digunakan, spesifikasi model dan variabel penelitian serta definisi operasional variabel. Selanjutnya akan diuraikan tentang proses estimasi yang dilakukan dengan data panel. Proses tersebut meliputi tentang model estimasi data panel, pemilihan model estimasi dan uji signifikansi terhadap variabel penelitian.

BAB IV KONDISI SOSIAL EKONOMI PULAU JAWA

Berisikan Kondisi Sosial Ekonomi wilayah yang dikelompokkan berdasarkan Jawa, Pesisir Utara Jawa dan pesisir selatan Jawa dari tahun 2002-2006

BAB V PEMBAHASAN

Berisikan kondisi PDRB dan variabel-variabel yang mempengaruhinya di wilayah pesisir dan non pesisir dengan pemilihan model-model estimasi.

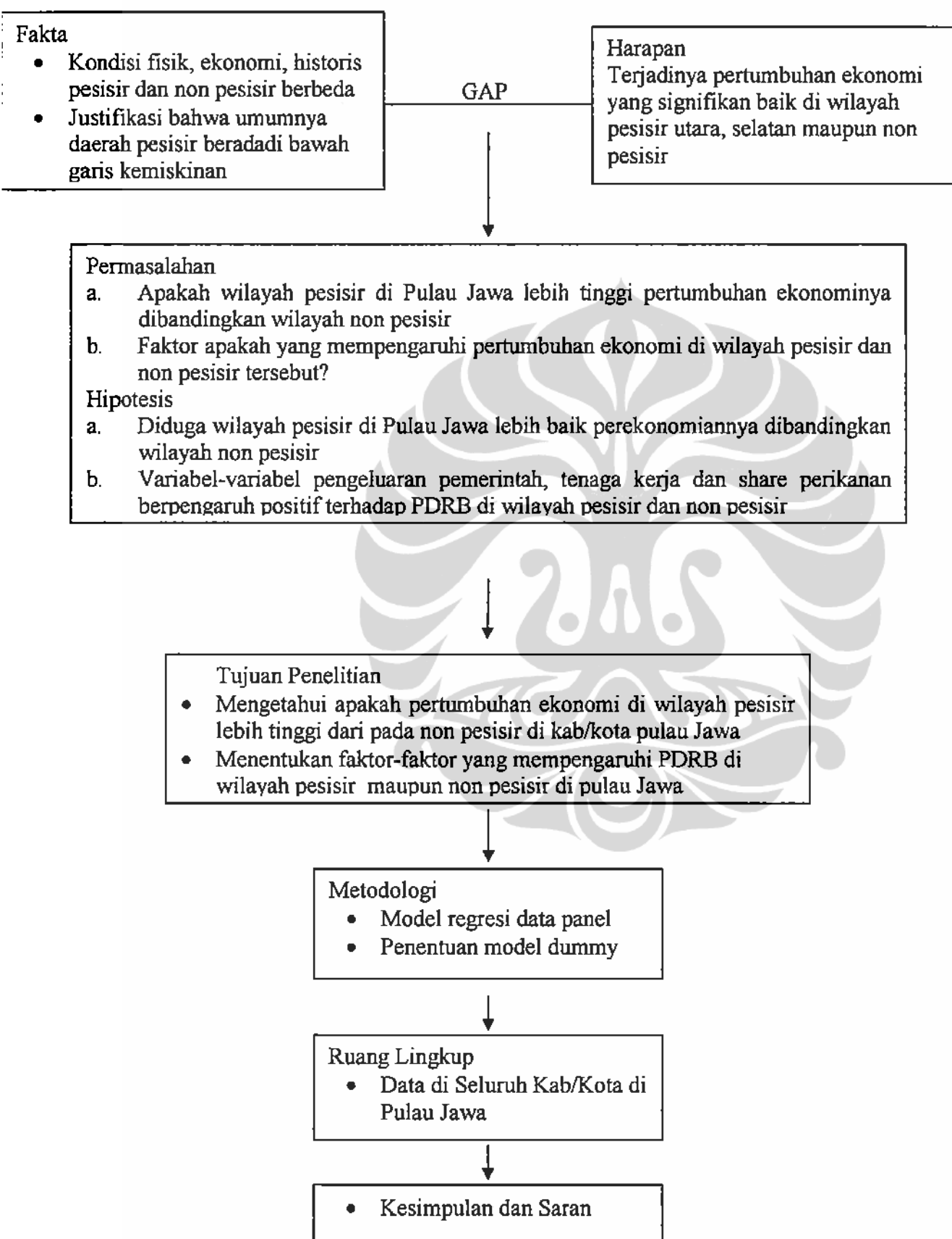
BAB VI PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi.

1.8. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan dalam tesis ini, berikut ini disajikan kerangka berpikir penelitian seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan keseluruhan proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses efisien bagi sebagian besar penduduk (Todaro, 2000). Namun proses pembangunan pernah dipahami sebagai proses pertumbuhan ekonomi belaka. (Riyanto 2003 dalam Rustiadi, 2001)

Konsep ekonomi neoklasik yang pernah diterapkan untuk mendorong percepatan pembangunan di negara berkembang terbukti gagal, karena hanya perbedaan kondisi dan perimbangan kualitas SDM pelaku ekonomi di negara maju dengan di negara berkembang. Hal ini terbukti dengan program perencanaan *Marshal Plan* yang berhasil membangun kembali ekonomi Jerman, tetapi kurang berhasil diterapkan di negara berkembang seperti India, Sri Langka, Philipina dan Indonesia. Program sejenis *Marshal Plan* yang diterapkan di negara berkembang yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan program investasi kapital, memang menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diikuti oleh memburuknya tingkat distribusi pendapatan, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati (Todaro, 2000).

Persoalan pembangunan di negara berkembang kemudian disadari, tidak hanya menyangkut perlunya investasi pembangunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki yang mendorong pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional. Dalam kerangka spatial, maka hasil pembangunan adalah adanya keseimbangan kemajuan antar wilayah (Hadi, 2001).

Pembangunan wilayah adalah proses atau tahapan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara

sumber daya manusia dengan sumberdaya lainnya termasuk sumberdaya alam dan lingkungannya melalui kegiatan investasi pembangunan (Hadi, 2001)

Pada umumnya negara berkembang pembangunan diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produksi total barang dan jasa masyarakat negara tersebut setiap tahunnya. Secara teknis ekonomi produksi total diukur oleh produk nasional bruto (PNB) dan produk domestik bruto (PDB). PNB adalah semua penjumlahan dari semua barang dan jasa-jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian ini tidak termasuk pendapatan orang-orang asing dan perusahaan asing.

Tujuan pokok pembangunan di bidang ekonomi adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator ekonomi untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat adalah PDRB Per Kapita. Data ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, apabila pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB.

Sektor pertanian memegang peranan yang penting dalam sumbangannya terhadap PDB, terutama bagi negara-negara sedang berkembang. Menurut Kuznet (1964) dalam Tambunan (2003), pertanian merupakan sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi produk, ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non pertanian sangat tergantung pada produk-produk dari sector pertanian bukan saja untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan, tetapi juga untuk penyediaan bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi di sektor-sektor non pertanian tersebut, terutama industri pengolahan makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang-barang dari kulit farmasi.

2. Kontribusi pasar, karena kuatnya agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal pembangunan, maka populasi di sektor pertanian (daerah pedesaan) membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar (permintaan) domestic terhadap produk-produk dari industri dan sector-sector lain di dalam negeri, baik untuk barang produsen maupun barang-barang konsumen.
3. Kontribusi faktor-faktor produksi, karena relatif pentingnya pertanian (dilihat dari sumbangan outputnya terhadap PDB dan andilnya dalam penyerapan tenaga kerja, tanpa bias dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi melibatkan transfer surplus modal dari sector pertanian ke sector-sector non pertanian. Sama juga, seperti dalam teori penawaran tenaga kerja tak terbatas dari Lewis, dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang terjadi perpindahan surplus tenagakerja dari pertanian (perdesaan) ke industri dan sector-sector non pertanian lainnya (perkotaan).
4. Kontribusi devisa. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (sumber devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian menggantikan impor (substitusi impor)

Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi menurut Jhingan (2000) terletak dalam hal (1) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat (2) meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusa diperluasnya sektor sekunder dan tersier (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus-menerus, (4) meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah, dan (5) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi (growth)

Meskipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tujuan pembangunan di negara-negara sedang berkembang, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tetap di pandang sebagai syarat perlu (*necessary condition*) bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan satu prakondisi yang sangat diperlukan bagi

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang lain seperti perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas harga.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut menekankan pada tiga aspek yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu..

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan menurut ahli ekonomi neo-klasik bahwa faktor produksi yang menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah faktor produksi modal dan tenaga kerja.

Indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan yang mendasari pemilihan indikator ini sebagai dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pertama, PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut diukur dari perbedaan PDB perkapita tahun tertentu dengan tahun sebelumnya

Alasan kedua adalah PDB dihitung berdasarkan konsep aliran (*flow concept*). Artinya penghitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Penghitungan tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Batas wilayah penghitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauhmana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik (Susanti, 2000)

Perhitungan PDRB maupun pertumbuhan PDRB selama ini seringkali melupakan keterkaitan antar daerah dalam suatu kegiatan produksi. Dalam realita dan perhitungan secara ekonomi sangatlah tidak mungkin perkembangan atau pembangunan suatu daerah hanya tergantung pada faktor produksi yang ada di

daerah tersebut. Kebijakan pembangunan nasional pun sangat berperan dalam mempengaruhi pembangunan daerah.

Sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa (Todaro) yaitu :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumberdaya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Meskipun demikian, masih dipertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang (sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kelebihan tenaga kerja) benar-benar akan memberikan dampak positif atau justru negatif, terhadap pembangunan ekonominya.
3. Kemajuan teknologi
Terdapat tiga klasifikasi kemajuan teknologi yaitu kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang hemat modal. Kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja adalah kemajuan teknologi yang berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal tenaga kerja (penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama). Kemajuan teknologi hemat modal merupakan fenomena yang amat langka. Hal ini karena hampir semua penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi

dilakukan di negara-negara maju dengan tujuan utama menghemat pekerja, dan bukan menghemat modal. Di negara-negara dunia ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi ini merupakan sesuatu yang paling diperlukan.

Teori yang menjelaskan hubungan antara beberapa input dan pertumbuhan nasional didasarkan kepada fungsi produksi. Dalam mikroekonomi fungsi produksi dinyatakan dengan pernyataan berapa banyak output dari perusahaan atau produsen akibat dari penggunaan input. Biasanya dalam fungsi produksi ini sering diungkapkan dalam bentuk nilai uang daripada jumlah (kuantitas) fisik.

Pada tingkat suatu negara atau ekonomi secara luas, fungsi produksi menggambarkan hubungan dari banyaknya tenaga kerja dan ketersediaan modal dengan tingkat GNP suatu negara. Hubungan ini disebut dengan fungsi produksi agregat. Fungsi produksi agregat adalah alat yang bermanfaat untuk menjelaskan seberapa besar hubungan input dan output pada tingkat nasional dengan bentuk yang konsisten.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran yang umum digunakan dalam pertumbuhan adalah (1). pertumbuhan output, (2). pertumbuhan output per tenagakerja dan (3). pertumbuhan output per kapita. Penggunaan ketiga ukuran tersebut tergantung pada maksud melakukan pengukuran. Pertumbuhan output digunakan sebagai indikator dari pertumbuhan kapasitas produktifitas yang tergantung pada tingkat dimana sebuah wilayah yang dapat menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain. Pertumbuhan output per tenaga kerja seringkali digunakan sebagai indikator perubahan dalam daya saing daerah (sejak menggunakan pengukuran produktivitas), pada saat pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai sebuah indikator perubahan dalam kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu tak ada ukuran terbaik dalam pertumbuhan regional. (Armstrong and Taylor, 1993 : 66).

2.2.2 Teori Ekonomi Klasik

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) dengan inti ajaran agar masyarakat diberi kebebasan seluas – luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang terbaik untuk dilakukan. Menurutnya sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary state*) yang terjadi apabila seluruh sumber daya alam telah dimanfaatkan. Jika ada pengangguran hanya bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian dengan tugas menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah juga berperan menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat “aturan main” yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Pengusaha perlu mendapat keuntungan yang memadai agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru. Sedangkan Joseph Schumpeter (Jerman 1911) mengatakan bahwa kondisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan selalu melakukan inovasi (Tarigan, 2005 : 47 - 49).

Sebagai akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929 – 1932, pandangan Smith dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. Kedua pandangan ini memiliki beberapa persamaan diantaranya sama – sama mengandalkan mekanisme pasar dan tugas negara untuk menciptakan distribusi pendapatan yang tidak terlalu pincang (ada kaitan dengan *saving* dan konsumsi) sehingga ekonomi dapat berjalan mantap dan berkelanjutan. Jika Smith menginginkan peran pemerintah sekecil mungkin, Keynes malah sebaliknya bahwa diperlukan peran pemerintah yang cukup besar dalam perekonomian. Dalam ekonomi wilayah,

tidak semua pandangan smith bisa diterapkan misalnya lokasi kegiatan ekonomi tersebut. Sesuai dengan tata ruang yang berlaku maka lokasi dari berbagai kegiatan sudah diatur dan kegiatan yang dilaksanakan harus memilih diantara lokasi yang diperkenankan.

Walaupun demikian masih banyak pandangan Smith yang relevan untuk perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga pemerintah daerah harus memberi kebebasan kepada masyarakat (pada lokasi yang diperkenankan), tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, tidak membuat tarif pajak yang terlalu tinggi dari daerah lain yang dapat membuat pengusaha enggan berinvestasi di daerah tersebut, menjaga keamanan dan ketertiban agar dapat berusaha, menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien serta tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit, serta berusaha menciptakan iklim yang kondusif sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Secara eksplisit teori Smith akan tumbuh pada kondisi pasar yang sempurna.

2.2.3 Pendekatan Neo-Keynes (Teori Harrod – Domar)

Teori pertumbuhan yang dikembangkan sejak perang dunia ke II bersumber pada kerangka analisis Keynes dirintis oleh Roy F. Harrod (1949 di Inggris). Pada waktu yang hampir bersamaan Evsey D. Domar (1957 Amerika Serikat) juga mengembangkan teori Keynes. Teori yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar menggunakan proses perhitungan yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda tetapi memiliki pola pendekatan yang sama dengan ciri ciri yang sama pula sehingga kesimpulannya juga sama, sehingga teori ini disebut teori Harrod – Domar (Djojohadikusumo, 1993 : 35).

Model Harrod-Domar memiliki keunggulan di dalam kesederhanaanya. Model ini banyak digunakan oleh negara-negara berkembang dalam perencanaan ekonominya. Namun model ini memiliki beberapa keterbatasan. Diketahui, bahwa ekonomi mencapai keseimbangan dalam keadaan khusus, yaitu dimana disebut sebagai kondisi “*steady state equilibrium*” pada saat “*warrant grow rate in output*” (rasio *propensity to save* dengan rasio kapital output ; s/v) sama dengan tingkat pertumbuhan alami tenaga kerja (n) dan dituliskan $s/v = n$. Model ini

menganggap modal dan tenaga kerja hanya meningkat dalam tingkat koefisien fungsi produksi yang konstan (*fixed coefficient production function*) dimana tidak memasukkan mekanisme penyesuaian jika terdapat surplus tenaga kerja baik terjadi pengurangan ($n > s/v$) atau kelebihan dari modal ($s/v > n$). Keterbatasan dari model ini sering disebut sebagai “problem mata pisau” dimana model ini terlalu banyak memasukkan parameter yang tetap (*fixed*). Oleh karena itu kerangka pemikiran Harrod-Domar cenderung menjadi tidak akurat dalam periode waktu yang panjang terhadap perubahan ICOR aktual.

Perhatian Harrod dipusatkan kepada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara ekulibrium antara tabungan – investasi – pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Agar konstelasi ekonomi yang dimaksud dapat berkembang, Harrod menggunakan dua konsep pengertian perihal laju pertumbuhan yaitu (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut pandang para pengusaha/calon investor, yang disebut Harrod sebagai *the warranted rate of growth* sedangkan (2) Harrod menunjukkan adanya *the natural rate of growth* dimana laju pertumbuhan produksi dan pendapatan ditentukan oleh kondisi pasar (*fundamental conditions*) yang menyangkut pada bertambahnya angkatan kerja karena penduduk bertambah serta meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi.

Saran Harrod bahwa pertumbuhan kontinu dalam keseimbangan hanya tercapai jika *the warranted rate of growth* identik dengan *the natural rate of growth*. Karena hal ini jarang terjadi (jika terjadipun hanya secara kebetulan) menjadikan pertimbangan dasar Harrod untuk mengungkapkan kesimpulan pokok yang bersifat *instability theorem*, yaitu proses pertumbuhan mengandung didalam dirinya sendiri secara inheren unsur ketidakstabilan yang sewaktu – waktu dapat mengganggu keadaan ekuilibrium. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya langkah – langkah kebijakan tertentu untuk menanggulangi gangguan – gangguan terhadap kestabilan dalam ekuilibrium pertumbuhan (Djojohadikusumo, 1993 : 38).

Sedangkan gagasan Domar berpangkal tolak pada berlakunya asas *investment multiplier*. Laju permintaan efektif langsung dihadapkan kepada pertumbuhan pada *kapasitas produksi*. Dalam modelnya disebutkan bahwa

pertumbuhan dalam permintaan adalah sama dengan investasi (I) dikalikan multiplier (I/s). Sedangkan pertumbuhan pada kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi oleh kapital output rasio (k). Dengan demikian pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan pada kapasitas produksi, atau $\Delta I/I = s/k$. Laju pertumbuhan diatas dianggap Domar sebagai laju pertumbuhan yang kritis (*critical rate of growth*) yang analog dengan *the warranty rate of growth* nya Harrod. Jika investasi melebihi laju pertumbuhan yang dimaksud diatas, maka penyimpangan tersebut menyebabkan bahwa $\Delta I/I > s/k$, yang membawa investasi dalam jumlah yang semakin besar (Djojohadikusumo, 1993 : 40 - 41).

Hal ini selaras dengan gagasan Harrod. Jika karena sebab apapun laju pertumbuhan investasi menyimpang dari laju kritis s/k , laju pertumbuhan pada kapasitas produksi, maka penyimpangan itu cenderung untuk berlangsung terus dan arah yang sama. Implikasi saran pendapat ini ialah diperlukannya intervensi kebijaksanaan jikalau kecenderungan penyimpangan hendak dikembalikan pada keadaan ekuilibrium.

Kelangsungan pemikiran Keynes ditandai oleh unsur – unsur dinamika dalam sistem analisis tentang proses ekonomi dan perkembangannya, dimana Keynes melihat pertumbuhan dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod – Domar melihatnya pada jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod - Domar didasarkan pada asumsi (1). Perekonomian bersifat tertutup; (2) hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan, proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*); (4) tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan asumsi – asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat – syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = k = n ,$$

dimana $g = growth$ (tingkat pertumbuhan output)
 $k = capital$ (tingkat pertumbuhan modal)
 $n =$ tingkat pertumbuhan angkatan kerja

agar terjadi ekuilibrium maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran (k) untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio* = rasio modal output). Apabila tabungan dan investasi adalah sama (I=S), maka ;

$$\frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} = \frac{S/Y}{K/Y} = \frac{S}{V}$$

karena s, v, dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit dicapai kondisi pertumbuhan mantap. Harrod – Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah, tetapi pemerintah tetap perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan dan sisi permintaan barang.

Menurut Richardson (Tarigan, 2005 : 49 – 51) dalam perekonomian regional dengan sistem perekonomian yang terbuka kekakuan tersebut dapat dapat diperlunak, dimana faktor – faktor produksi / hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran – kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat menyedot output kapasitas penuh dari faktor – faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak diinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah – daerah lain yang tercermin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang dapat diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkan n dan g. Jadi dalam perekonomian terbuka, persyaratannya agak sedikit longgar, dimana

$$S + M = I + X \text{ dapat dirumuskan menjadi :}$$

$$(s + m) Y = I + X, \text{ atau } I/Y = s + m - (X/Y)$$

Seperti diketahui bahwa ekspor suatu daerah i dapat dirumuskan sebagai impor daerah – daerah lain, sehingga

$$X_i = \sum_{j=1} M_{ji} = \sum_{j=1} m_{ji} Y_j$$

ekspor daerah i = total impor daerah – daerah j dari daerah i = m (*marginal propensity to import*) daerah – daerah j dari daerah i dikalikan dengan tingkat pendapatan masing – masing setiap daerah j. Dengan demikian pertumbuhan suatu wilayah adalah

$$g_i = (s_i + m_i - \sum_{j=1} m_{ji} Y_j / Y_i) / v_i$$

dengan persamaan diatas maka agar suatu daerah tumbuh cepat atau $g_i =$ tinggi, dikehendaki agar s_i (tingkat tabungan) = tinggi, m_i (impor) = tinggi, ekspor = kecil, $\sum v_i$ (*capital output ratio = COR*) = kecil, artinya dengan modal yang kecil dapat meningkatkan *output* yang sama besarnya. Dalam model ini kelebihan atau kekurangan tabungan dan tenaga kerja dapat dinetralisir oleh arus keluar atau arus masuk dari setiap faktor diatas. Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak.

Pada model ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Dalam prakteknya daerah yang pertumbuhannya tinggi (daerah yang telah maju) akan menarik modal tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah dan hal ini membuat pertumbuhan antar daerah menjadi pincang, sehingga daerah yang maju kian maju dan yang terbelakang akan semakin ketinggalan.

Jadi pertumbuhan antar daerah akan mengarah kepada *heterogenous* (makin pincang). Untuk daerah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarnya sangat sulit sangat perlu memperhatikan teori ini. Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit melakukan konversi antara barang dan tenaga kerja. (Tarigan, 2005 : 50 -52).

2.2.4 Pendekatan Neo Klasik

Yang mengusung pendekatan ini adalah pemikir – pemikir ekonomi yang menentang ajaran Keynes dan Neo Keynes diantaranya adalah Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W Swan (1956) dari Australia. Model Solow – Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya *output* yang saling berinteraksi. Robert Solow memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan langkah yang lebih maju dari model Harrod-Domar. Solow menjawab keterbatasan dari model terdahulu dengan mengeluarkan “*fixed coefficient production function*” dan menggantinya dengan fungsi produksi neoklasikal dengan koefisien substitusi.

dalam modelnya dan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dalam model ini terdapat fleksibilitas antara rasio modal - *output* dan rasio modal - tenaga kerja.

Dalam banyak hal mekanisme pasar diyakini dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi (peningkatan *skill* dan atau kemauan teknologi membuat produktivitas per kapita meningkat). Dalam hal ini masalah teknologi merupakan fungsi dari waktu sehingga persamaannya adalah

$$Y_i = f_i(K, L, t)$$

dan oleh Richardson dalam ekonomi regional persamaan tersebut diderivasikan menjadi :

$$Y_i = a_i k_i + (1 - a_i) n_i + T_i \quad \text{dimana :}$$

Y_i = besarnya *output*

k_i = tingkat pertumbuhan modal

n_i = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

T_i = kemajuan teknologi

a_i = bagian yang dihasilkan oleh faktor modal

$(1 - a)$ = bagian yang dihasilkan oleh faktor di luar modal

agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh perlu mekanisme yang menyamakan investasi dan tabungan (dalam kondisi *full employment*), sehingga pertumbuhan memerlukan syarat :

$$MPK_i = a_i (Y_i / k_i) = p$$

MPK_i = *marginal productivity of capital*

jika p sudah tertentu dan a tetap konstan maka Y dan K harus tumbuh dengan tingkat yang sama. Dengan syarat keseimbangan bagi keseluruhan sistem adalah :

$$\sum_{i=1} I_i = \sum_{i=1} S_i$$

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhannya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna MPL (*marginal productivity of labour*) adalah fungsi langsung tapi bersifat

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna MPL (*marginal productivity of labour*) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari MPK (*marginal productivity of capital*). Hal ini dapat dilihat dari rasio modal – tenaga kerja (K/L).

Apabila tiap daerah dimisalkan menghasilkan *output* yang homogen dari fungsi produksi yang identik maka didaerah yang K/L –nya tinggi terdapat upah riil yang tinggi dan MPK yang rendah dan sebaliknya, dimana modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang lebih tinggi. Dan sebaliknya tenaga kerja akan mengalir dari daerah upah rendah ke daerah upah tinggi, sehingga tercipta mekanisme balas jasa faktor – faktor produksi di semua daerah sama, dan menyebabkan perekonomian regional atau pendapatan per kapita regional akan mengalami proses konvergensi (makin sama).

Model ini mengasumsikan bahwa $I = S$, dimana kebiasaan masyarakat yang suka menyimpan uang kontan dalam jumlah besar dirumah tanpa tujuan khusus dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Paham ini juga melihat peran kemajuan teknologi/inovasi sangat besar memacu pertumbuhan wilayah dan terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) diperlukan suatu tingkat tabungan ($s = \text{saving}$) yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali ke wilayah tersebut.

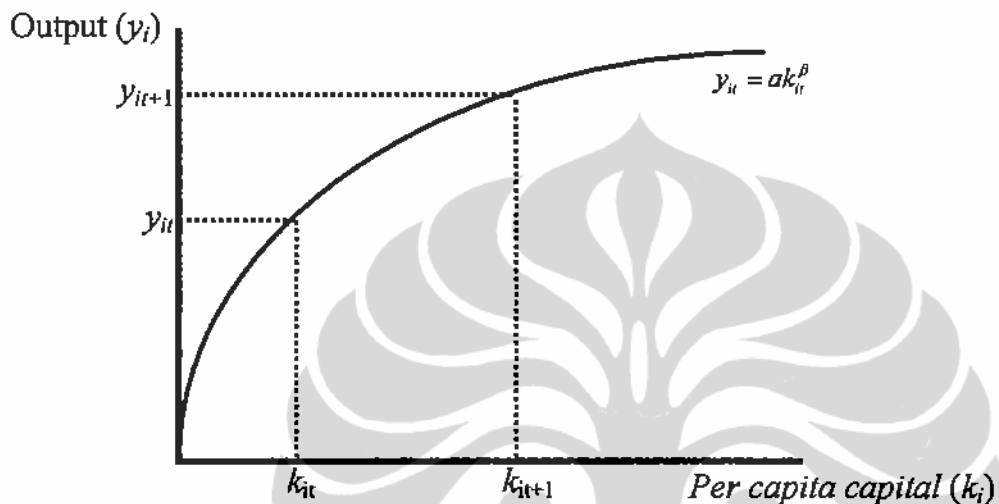
Model Solow menekankan pada peran akumulasi modal. Oleh sebab itu output merupakan produksi dari modal dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sesuai dengan memperbesar kemampuan teknis tenaga kerja yang berperan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dalam jangka panjang output per kapita dan produktivitas tenaga kerja meningkat secara eksogenus pada tingkat kemajuan teknik yang mana kemajuan teknik sepenuhnya eksogenus.

Model dalam bentuk fungsi produksi ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$y_{it} = ak_{it}^{\beta}, \quad 0 \leq \beta \leq 1$$

dimana y_{it} adalah pendapatan perkapita sektor i pada waktu t , k_{it} adalah modal per kapita (*capital labor ratio*), a adalah perubahan teknologi, dan β

elastisitas modal. Sektor i dapat mengacu kepada individual, negara, kawasan, dan sektor ekonomi. Perubahan modal perkapita mempunyai hubungan positif dengan investasi per tenaga kerja, tetapi mempunyai kaitan negatif dengan pertumbuhan penduduk dan depresiasi.



Gambar 2.1. Pertumbuhan Output pada Model Neoclassical.

Dari model pada persamaan diatas yaitu i mengacu kepada wilayah (*region*), Teori pertumbuhan regional neoklasikal dapat dibangun. Pertumbuhan regional adalah pergerakan sederhana dari fungsi produksi akumulasi semua faktor dari periode t ke periode $t + 1$ (lihat gambar 2.1)

Sejumlah asumsi yang mendasari teori pertumbuhan regional neoklasikal : *pertama* fungsi agregat produksi menunjukkan output regional, perbedaan antara industri dalam wilayah diabaikan dan diasumsikan output regional *homogenous*. *Kedua* antar wilayah teknologi diasumsikan sama, *ketiga* skala pengembalian dalam produksi (*returns to scale*) diasumsikan konstan, *keempat* pasar diasumsikan persaingan sempurna, *kelima*, supply nasional dari tenaga kerja, jumlah dari semua wilayah diasumsikan tetap, *keenam*, tenaga kerja dan modal diasumsikan mencari tingkat pengembalian wilayah yang tertinggi, *ketujuh*, wilayah diasumsikan menghadapi kurva elastisitas permintaan yang sempurna untuk output mereka.

Menurut Richardson (Richardson, 2001 : 35) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan ekonomi nasional dan analisis pertumbuhan regional adalah bahwa yang di titikberatkan dalam analisis pertumbuhan regional adalah perpindahan faktor (*factor movements*). Ada dua pendekatan metodologis yang sangat berbeda dalam pertumbuhan regional yang sifatnya komplementer, yaitu mengadaptasi model – model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agregatif (dan varian – varian regional khusus seperti teori basis ekspor) atau menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut dinamika sektor industrinya.

Pertumbuhan ekonomi regional menurut Tarigan adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riil yaitu harga konstan. Dalam teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional, antara lain akan dibahas pengkalsifikasian pendapatan dari satu daerah dan faktor – faktor apa yang menunjang peningkatan pendapatan daerah tersebut. (Tarigan, 2005 : 46 - 47).

2.3 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Pengeluaran pembangunan daerah di wilayah Jawa memiliki keragaman yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan keragaman di wilayah-wilayah di Luar Jawa (Nurmanaf, 1999)

Berdasarkan rata-rata pengeluaran pembangunan dan dikaitkan dengan prioritas program pembangunan itu sendiri, tahap pembangunan dapat dikriteriakan dalam tiga fase yang dilaksanakan di masing-masing propinsi.

1. Fase pertama merupakan tahap pembangunan melaksanakan program dengan lebih memprioritaskan pembangunan fisik yang ditunjukkan oleh rata-rata pengeluaran pembangunan yang lebih tinggi. Dalam fase ini pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pembangunan prasarana yang diperlukan untuk menunjang tahapan pembangunan berikutnya.:

2. Fase kedua lebih menitikberatkan pada program pembangunan non fisik yang umumnya memerlukan pembiayaan pembangunan yang lebih kecil. Antara lain provinsi yang melaksanakan fase ini adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
3. Fase ketiga dicirikan dengan tingginya rata-rata pengeluaran pembangunan di masing-masing propinsi. Propinsi yang berada dalam fase ini antara lain : DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Wilayah-wilayah yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik cenderung memiliki rata-rata pengeluaran pembangunan yang lebih tinggi ketimbang wilayah-wilayah yang prioritas pembangunannya didominasi oleh pembangunan non fisik. Sementara wilayah-wilayah yang melaksanakan pembangunan dengan penekanan kedua-duanya secara berimbang, cenderung memiliki rata-rata pengeluaran pembangunan yang lebih besar.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan dan sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari 21 jenis pengeluaran yang berorientasi ke 20 jenis sektor pembangunan dan satu jenis kelompok pengeluaran pembangunan lainnya antara lain : industri; pertanian dan kehutanan; sumber daya air dan irigasi; tenaga kerja; perdagangan, pengembangan usaha daerah dan koperasi; transportasi meteorology dan geofisika; pertambangan dan energi; pariwisata, pos dan telekomunikasi; pembangunan daerah dan Transmigrasi; lingkungan hidup; pendidikan, kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga; Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja; Perumahan Rakyat dan Pemukiman; Agama; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian; Hukum; Aparatur Pemerintah dan Pengawasan; Politik, penerangan, komunikasi dan Media Massa, keamanan dan Ketertiban Umum; Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan; dan lain-lain.

Seperti halnya struktur APBN, mulai tahun 2005 tidak dikenal lagi istilah belanja rutin dan pembangunan. Istilah yang digunakan adalah belanja barang dan belanja modal.

Negara-negara penganut ekonomi liberal berpendirian bahwa sebaiknya peranan pemerintah dalam perekonomian adalah sekecil mungkin, karena peran pemerintah dalam mekanisme harga akan menyebabkan inefisiensi (Nurdjaman, 1992). Menurut pendapatnya sebuah perekonomian yang ideal, adanya pengaturan alokasi sumber daya yang terjadi karena adanya pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Di lain pihak dalam kenyataannya seringkali terjadi ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan karena adanya *assymetric information*, monopoli maupun distribusi pendapatan yang tidak merata.

Sementara itu Romer (2006) menyatakan bahwa sama halnya dengan modal fisik maka modal manusia juga dilihat sebagai variabel yang bersifat eksogen. Model ini mengasumsikan bahwa modal manusia setiap tenaga kerja tergantung pada tahun-tahun pendidikan yang diikutinya. Hasil penelitian empiris John Baffers dan Anwar Syah (1998) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengambil peranan dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan pendapat aliran Keynes bahwa diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sehingga saat ini terjadi gejala umum dimana dari waktu ke waktu volume kegiatan pemerintah terus meningkat.

Dengan menggunakan kurva IS-LM maka dapat diperoleh bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran pemerintah akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor antara lain produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan keseimbangan perekonomian (Brata dan Trihartanto, 2004)

Meskipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tujuan pembangunan di negara-negara sedang berkembang, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tetap di pandang sebagai syarat perlu (*necessary condition*) bagi perbaikan kesejahteraan

masyarakat dan juga merupakan satu prakondisi yang sangat diperlukan bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang lain seperti perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas harga.

Pengeluaran pemerintah akan mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah merupakan biaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Melalui pengeluaran pemerintah dapat menunjang sektor produksi dengan tersedianya faktor-faktor modal, tenaga kerja dan manajemen tersebut. Sumber daya manusia yang terdidik akan memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sektor produksi.

Distribusi barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Demikian pula pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang dikeluarkan untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang mempunyai daya beli rendah akan menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

2.3 Ketenagakerjaan

Untuk mengenal aspek ketenagakerjaan menurut Susanti dkk, (2007) maka terlebih dahulu mengenal definisi penduduk. Dalam demografi yang dimaksud penduduk suatu negara adalah seluruh penduduk yang tinggal (menetap) di negara tersebut. Sedangkan penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dengan tujuan mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhannya.

Dari definisi tersebut, maka angkatan kerja terdiri atas tenaga kerja yang bekerja dan tenaga yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk pada kelompok umur tertentu yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Batasan umur yang digunakan di Indonesia saat ini adalah 15 tahun ke atas. Batasan umur tenaga kerja antar negara tidak sama,

berikut makin lama akan menjadi makin bertambah kecil. Apabila penambahan tenaga kerja terus dilakukan, pada suatu ketika tambahan tenaga kerja yang dipekerjakan tidak akan menghasilkan tambahan produksi. Dan sesudah itu penambahan tenaga kerja akan mengurangi tingkat produksi.(Sukirno, 2007).

Angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja akan menciptakan adanya pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka nasional cenderung terus mengalami peningkatan merupakan fenomena yang menjadi pembahasan bagi studi-studi ekonomi regional di dunia. Kecenderungan peningkatan tingkat pengangguran secara nasional telah dijelaskan pada tulisan diatas yang merupakan hasil agregasi dari tingkat pengangguran daerah. Peningkatan secara keseluruhan tingkat pengangguran daerah akan meningkat juga tingkat pengangguran nasional.

2.4 Wilayah Pesisir

Sesungguhnya Indonesia adalah negara bahari. Menurut (DKP, 2008) Dengan aset sumberdaya tiga perempat dari total luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta km² merupakan hamparan laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Bahkan 70 persen berisi perairan yang didalamnya terkandung berbagai potensi sumberdaya alam (ikan, mineral, minyak dan gas) berlimpah. Selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang perairannya menjadi lalu lintas pelayaran internasional yang sangat strategis.

Dengan modal sumberdaya yang melimpah itu terbukti mengalami pertumbuhan pada produksi perikanan, perkembangan ekspor dan neraca perdagangan hasil perikanan yang ditandai dengan PDB subsektor perikanan tahun 2002-2006 yang mengalami peningkatan sebesar 15,5 % (DKP, 2008). Nilai ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan PDB nasional, baik dengan maupun tanpa minyak dan gas (migas). Namun jika dibandingkan dengan kenaikan PDB kelompok sektor pertanian, yang terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan maka kenaikan subsektor perikanan jauh lebih tinggi.

Sementara itu, kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian setiap tahun meningkat rata-rata sebesar 3 % bahkan pada tahun 2006 kontribusi

tersebut mencapai hampir 17 %. Apabila dihitung dengan kontribusi dari kegiatan pengolahan produk perikanan maka kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional mencapai sekitar 2,4 %.

Menurut DKP, 2008 fakta menunjukkan, produksi nasional selama periode 1999-2006 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,24 % per tahun, yakni dari 4,89 juta ton pada 1999 menjadi 7,45 juta ton (2006). Produksi ini bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dari kedua sumber tersebut, usaha perikanan tangkap masih mendominasi (65 %) produksi perikanan nasional pada tahun 2006.

Ironisnya, kekayaan sumberdaya kelautan yang sangat berlimpah tersebut justru tak mampu mensejahterakan penduduk yang menempati wilayah pesisir. Upaya ini tidaklah mudah apalagi dengan melihat kondisi penduduk yang menempati daerah pesisir sekitar 16,42 juta orang yang bermukim di 8.090 desa di seluruh Indonesia. (DKP, 2008)

Wilayah pesisir dan lautan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Dahuri *et al.*, (1996) menyatakan wilayah pesisir dan lautan merupakan tumpuan harapan bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya dikatakan bahwa sebagian besar (63%) dari wilayah teritorial Indonesia merupakan wilayah pesisir dan lautan yang mengandung sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam; misalnya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, bahan tambang, jasa perhubungan dan pariwisata. (Dahuri *et al.*, 1996).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memuat spesifikasi spesifikasi model. Rancangan model, estimasi model, evaluasi model, populasi penelitian, sumber data, teknik analisa data dan ruang lingkup penelitian. Penjelasan mengenai sub bab tersebut sebagai berikut :

3.1 Metode Deskriptif

Untuk menganalisis dan mengetahui perekonomian daerah pesisir maupun non pesisir digunakan analisis deskriptif . Kabupaten/Kota yang ada dikelompokkan menjadi daerah pesisir utara , pesisir selatan dan non pesisir. Adapun wilayah pesisir utara terbagi dalam 4 provinsi

1. Provinsi Jabar terdiri dari :

- Cirebon
- Indramayu
- Subang
- Karawang
- Bekasi
- Kota Cirebon

2. Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- Rembang
- Pati
- Jepara
- Demak
- Kendal
- Batang
- Pekalongan
- Pemasang
- Tegal
- Brebes
- Kota Semarang

- Kota Pekalongan
- Kota Tegal

3. Propinsi Jawa Timur, terdiri dari :

- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Probolinggo
- Pasuruan
- Surabaya

5. Propinsi Banten, terdiri dari

- Tangerang
- Serang
- Cilegon

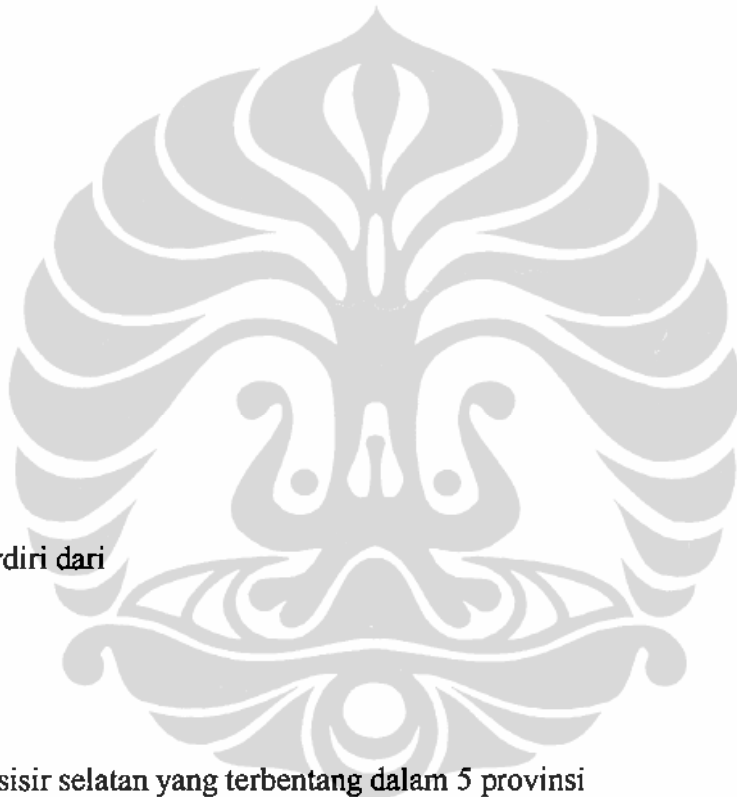
Berikutnya wilayah pesisir selatan yang terbentang dalam 5 provinsi

1. Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari

- Sukabumi
- Cianjur
- Garut
- Tasikmalaya
- Ciamis

2. Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

- Cilacap
- Kebumen
- Purworejo



3. Provinsi DI Yogyakarta yang terdiri dari :

- Kulon Progo
- Bantul
- Gunung Kidul

4. Provinsi Jawa Timur

- Pacitan
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi

5. Provinsi Banten yang terdiri dari

- Pandeglang
- Lebak

Wilayah Non pesisir (wilayah yang tidak berbatasan dengan laut) meliputi 5 provinsi yaitu :

1. Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

- Bogor
- Bandung
- Kuningan
- Majalengka1)
- Sumedang
- Purwakarta
- Kota Bogor
- Kota Sukabumi
- Kota Bandung
- Kota Bekasi
- Kota Depok

2. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- Banyumas

- Purbalingga
- Banjarnegara
- Wonosobo
- Magelang
- Boyolali
- Klaten
- Sukoharjo
- Wonogiri
- Karanganyar
- Sragen
- Grobogan
- Blora
- Kudus
- Semarang
- Temanggung
- Magelang
- Surakarta
- Salatiga

3. Provinsi DI Yogyakarta

- Sleman
- Yogyakarta

4. Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

- Ponorogo
- Kediri
- Malang
- Bondowoso
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi



- Bojonegoro
 - Kediri
 - Blitar
 - Malang
 - Mojokerto
 - Madiun
5. Provinsi Banten, terdiri dari :
- Kota Tangerang

3.2 Spesifikasi Model

3.2.1 Model regresi majemuk data panel

Analisis regresi membahas hubungan antar variabel yang disebut variabel terikat dan variabel lain yang disebut sebagai variabel bebas. Pada model ini digunakan data panel yaitu data yang dikumpulkan secara *cross section* dan diikuti pada periode waktu tertentu .

Maka modelnya dituliskan sebagai :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad i=1,2,\dots, N; \quad T=1, 2, \dots, T$$

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Metode pendugaan yang sering digunakan adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*), akan tetapi karena data panel diperoleh dari penggabungan data, maka jika menggunakan OLS kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu.

Keuntungan dari data panel antara lain menurut Gujarati (2003) , yaitu : :

- a. Mampu untuk melihat heterogenitas dari individual (Kabupaten/kota) sepanjang waktu observasi. Model Panel Data mampu menangkap karakteristik yang spesifik (individual spesifik) dari masing-masing daerah.
- b. Dengan mengkombinasi data *time series* dan data *cross section*, akan memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, mengurangi

kolinearitas antar variabel, memperbesar banyak *degrees of freedom* dan lebih efisien.

- c. Dengan unit data yang lebih besar, panel data dapat meminimalkan bias yang mungkin muncul dari agregasi data individual.
- d. Panel data memungkinkan untuk mempelajari model-model perilaku yang lebih kompleks.
- e. Data panel memungkinkan untuk mengetahui perubahan yang dinamis dari observasi *cross section*.

Selain itu Baltagi and Song (2006) mempertegas kelebihan data panel dibandingkan *cross section* dan *time series* bahwa dengan data yang lebih besar data lebih variatif dan lebih sedikit kolinearitas diantara variabel-variabel bebasnya. Lebih lanjut data panel memberikan data yang lebih informatif dengan estimasi yang lebih dipercaya karena dibatasi oleh sedikitnya asumsi.

3.2.2. Rancangan Model

Model yang digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan mengacu kepada model pertumbuhan Sollow. Kajian yang dilakukan menggunakan fungsi produksi agregat untuk melihat hubungan antara nilai tambah output (y) dengan jumlah tenaga kerja (L), jumlah input modal swasta (K) dapat dituliskan :

$$Y = Af(K, L)$$

Y adalah output, K adalah jumlah kapital. L adalah jumlah tenaga kerja, dimana α dan β adalah konstan. Menurut Nazara (1994) dalam Isard (1998) A adalah representasi dari *total factor productivity*. Dalam hal ini diasumsikan spesifikasi dari model adalah homogen derajat satu untuk semua input L , dan K .

Karena itu model tersebut dapat di tuliskan dalam bentuk fungsi produksi *Cobb Douglas* yaitu :

$$Y_{it} = A_{it} K_{it}^{\alpha} L_{it}^{\beta}$$

Hubungan antara output dan input tersebut adalah tidak linear, maka dibuat dalam model transformasi logaritma menjadi :

$$\ln Y_{it} = \ln A + \alpha \ln K_{it} + \beta \ln L_{it} + u$$

Maka Y_{it} (PDRB) tergantung dari produktifitas daerah (A), Kapital (K_{it}), Tenaga Kerja (L_{it}) masing-masing kabupaten/kota i pada waktu t . Masing-masing β

adalah koefisien elastisitas input terhadap output yang berkaitan dengan K, L dan u adalah *stochastic disturbance term*.

Dari bentuk standard tersebut, ditambahkan dengan share perikanan. Share perikanan ingin melihat adanya kontribusi subsektor perikanan dalam membentuk PDRB di suatu wilayah Kab/Kota. Selain itu dalam penelitian ini kapital diproksi dengan pengeluaran pemerintah dengan asumsi investasi swasta tidak ada. Sehingga modelnya menjadi :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_i + \beta_{2i} \ln PEM_{it} + \beta_{3i} \ln TK_{it} + \beta_{4i} RPRIK_{it} + u$$

Dimana:

- $PDRB_{it}$: PDRB untuk kab/kota ke -i dan waktu ke-t (dalam juta rupiah)
 PEM_{it} : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t (dalam ribu rupiah)
 TK_{it} : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t (jiwa)
 $RPRIK$: Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t (persen)

Persamaan ini hanya untuk menganalisa untuk wilayah Jawa secara keseluruhan. Sedangkan untuk menganalisa wilayah menjadi tiga wilayah pesisir utara Jawa , pesisir selatan Jawa dan non pesisir digunakanlah model *dummy* sehingga model menjadi :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D1_i + \alpha_3 D2_i + \beta_{2i} \ln PEM_{it} + \beta_{3i} \ln TK_{it} + \beta_{4i} RPRIK_{it} + u$$

Dimana :

- $PDRB_{it}$: PDRB untuk kab/kota ke -i dan waktu ke-t (dalam juta Rp)
 $\alpha_2 D1_i$: Koefisien untuk daerah Pesisir Utara
 $\alpha_3 D2_i$: Koefisien untuk daerah pesisir selatan
 PEM_{it} : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke- t
 TK_{it} : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
 $RPRIK$: Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t

Sedangkan untuk melihat masing-masing pengaruh variabel pada wilayah tertentu, maka digunakanlah model bentuk ke tiga yaitu menggunakan Model Koefisien Acak dengan menggunakan variabel *dummy*. Model estimasinya adalah sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D1_i + \alpha_3 D2_i + \beta_2 \ln PEM_{it} + \beta_3 \ln TK_{it} + \beta_4 RPRIK_{it} + \gamma_1(D1 \ln PEM_t) + \gamma_2(D1 \ln TK_t) + \gamma_3(D1 RPRIK_t) + \gamma_4(D2 \ln PEM_t) + \gamma_5(D2 \ln TK_t) + \gamma_6(D2 RPRIK_t) + \epsilon_{it}$$

Dimana :

- $PDRB_{it}$: PDRB untuk kab/kota ke -i dan waktu ke-t (dalam juta Rp)
- $\alpha_2 D1_i$: Koefisien untuk daerah Pesisir Utara
- $\alpha_3 D2_i$: Koefisien untuk daerah pesisir selatan
- PEM_{it} : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
- TK_{it} : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
- $RPRIK$: Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
- $D1PEM$: Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- $D1TK$: Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- $D1RPRIK$: Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- $D2PEM$: Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan
- $D2TK$: Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan
- $D2RPRIK$: Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan

Hipotesa yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan perumusan hipotesa sebelumnya adalah menduga jika semua variabel adalah

positif terhadap variabel dependennya. Mengingat data yang digunakan adalah kombinasi dari *time series* dan *cross section*, maka kita dapat melihat perubahan variabel masing-masing daerah dari waktu ke waktu .

Data untuk menggambarkan variabel tersebut diperoleh dari :

- a. Output diukur dengan PDRB kabupaten/Kota di seluruh Jawa terkecuali propinsi DKI Jakarta.
- b. Kapital didekati dengan pengeluaran pemerintah dengan mengasumsikan invstasi swasta adalah nol Sumber daya yang digunakan adalah pengeluaran pembangunan karena merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan.
- c. Tenaga kerja dihitung dengan jumlah tenaga kerja usia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu.
- d. Share sub sektor perikanan diperoleh dari data subsektor perikanan terhadap total PDRB kab/kota menurut lapangan usaha

3.3 Teknik Estimasi

Beberapa teknik estimasi yang digunakan dalam data panel adalah :

- a. *Pooled Regresion Model (common effect)*

Model :

$$\frac{y_{it} - y_{it-1}}{y_{it-1}} = \gamma_1 + \gamma_2 \ln y_{it-1} + \sum_{j=3}^m \gamma_j X + \sum_{j=6}^n \gamma_{jm+1} Z + u$$

Dalam model ini mengabaikan dimensi ruang dan waktu, dan estimasi dilakukan OLS. Dalam model ini nilai intersep dari semua daerah dianggap sama. Begitu juga koefisien regresi dari varabel-variabel independent dianggap identik.

- b. Menggunakan *dummy variable*

3.4 Populasi Penelitian

Sebagai populasi penelitian ini adalah seluruh sektor perekonomian di Pulau Jawa. Sedangkan sampel berupa variabel yang dianggap berpengaruh terhadap PDRB tahun 2002 -2006

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik menurut Kab/kota selama periode 2002-2006. data tersebut meliputi data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga constan tahun 2000, Pengeluaran Pemerintah, data tenaga kerja yang bekerja dan share subsektor perikanan terhadap PDRB. Sumber data berasal dari BPS Pusat, BPS propinsi.

3.6 Teknik Analisa Data

a. Uji Signifikansi

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu fakta sebagai fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji kesesuaian model (R^2), uji secara serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test) untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesa nol.

b. Uji Secara parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik dan dimaksudkan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model secara individual dapat mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

1. Hipotesa positif dan signifikan

$H_0 =$ masing-masing koefisien regresi bernilai = 0

$H_1 =$ masing-masing koefisien regresi bernilai $\neq 0$

2. Hipotesa negatif dan signifikan

$H_0 =$ masing-masing koefisien regresi bernilai = 0

$H_1 =$ masing-masing koefisien regresi bernilai $\neq 0$

Langkah selanjutnya dalam pengujian ini adalah dengan menentukan daerah kritis melalui t-tabel dan t-hitung sebagai berikut :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_j} = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\left(\frac{1}{n-k}\right) \sum e_i^2 (X'X)^{-1}_{jj}}}$$

Dimana :

$\hat{\beta}_j$ = koefisien penduga variabel ke-j

\hat{S}_j = koefisien *standard error* variabel ke -j

e_i^2 = residual *sum of square*

Jika nilai uji t lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hipotesa nol diterima, dan berarti uji t dianggap tidak signifikan. Sebaliknya bila nilai uji t lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis nol ditolak, berarti uji t dianggap signifikan.

c. Uji Kesesuaian (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi. Lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk R^2 memberikan proporsi atau prosentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X secara bersama-sama. Besaran R^2 dihitung dengan menggunakan

Rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \frac{ESS}{TSS}$$

Besaran R^2 terletak antara 0 dan 1 jika $R^2 = 1$ berarti bahwa semua variasi dalam variabel terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100 %. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika nilai R^2 mendekati 1.

d. Uji Secara Serempak (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta = 0$ (variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat)

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta \neq 0$ (variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat)

Sebelum melakukan uji ini perlu ditetapkan F tabel dan daerah kritis dengan mencari nilai F hitung dengan menggunakan rumus :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{(R_u^2 - R_r^2)/q}{(1 - R_u^2)/(n - k)}$$

Dimana :

R_u^2 = Nilai R-square yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heteroskedastisitas dan ada serial korelasi antar *error term*

R_r^2 = Nilai R-square yang telah direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki homoskedastisitas dan tidak ada serial korelasi antar *error term*

q = Jumlah variabel yang direstriksi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel bebas +1 (intersep)

Apabila F-hitung berada di daerah terima H_0 , berarti F-stat terbukti tidak berpengaruh. Dan apabila F-hitung berada di daerah terima H_1 , maka F-stat terbukti berpengaruh.

BAB IV

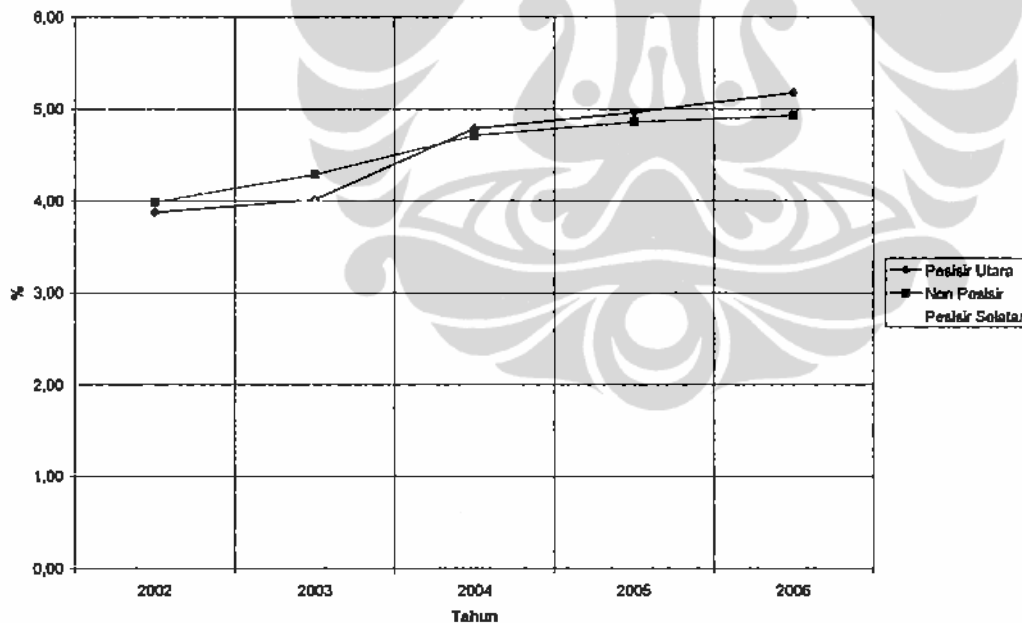
PROFIL PEREKONOMIAN WILAYAH PESISIR DI PULAU JAWA

4.1 Kondisi Perekonomian di Pulau Jawa

Pada awal pembangunan ekonomi suatu wilayah, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Meskipun laju pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah, banyak ekonomi sepakat bahwa laju pertumbuhan ekonomi penting untuk mengukur perkembangan produk suatu wilayah dengan berbagai implikasinya.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Dengan membandingkan ketiga wilayah di Pulau Jawa maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pesisir dan Non Pesisir di Jawa



Dari grafik diatas umumnya di ketiga wilayah tersebut terlihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Hanya wilayah pesisir selatan yang terlihat mengalami penurunan pada tahun 2006. Wilayah pesisir utara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 selalu mempunyai pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya. Hanya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mempunyai pertumbuhan ekonomi

tidak lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa untuk wilayah pesisir utara pertumbuhan terendah ada di wilayah Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan pertumbuhan 2.42 % . Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Cilegon yang mencapai 6,71 %, diatas pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang hanya 4,51 %. Hal ini dapat dipahami pertumbuhan yang baik di kota ini disebabkan basis wilayah sebagai daerah industri.

Pada wilayah pesisir selatan terlihat Kabupaten Trenggalek mempunyai pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan 19 kabupaten/kota lainnya dan yang terendah terjadi pada Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah non pesisir terlihat paling tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa yakni Kota Bandung dimana pertumbuhannya mencapai 7,36 %. Hal ini bisa disebabkan Kota Bandung sebagai kota yang berbasis wisata mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi dari sektor ini.

Tabel 4.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Non Pesisir Tahun
2002 -2006

Provinsi	No.	Kab/Kota	%
Pesisir Utara	1	Cirebon	4,60
	2	Indramayu	4,52
	3	Subang	5,07
	4	Karawang	5,33
	5	Bekasi	5,51
	6	Kota Cirebon	4,71
	7	Rembang	4,00
	8	Pati	2,69
	9	Jepara	4,04
	10	Demak	3,37
	11	Kendal	2,98
	12	Batang	2,42
	13	Pekalongan	3,82
	14	Pemalang	3,68
	15	Tegal	5,19
	16	Brebes	4,86
	17	Kota Semarang	4,54
	18	Kota Pekalongan	3,42
	19	Kota Tegal	5,30
	20	Situbondo	4,40
	21	Probolinggo	4,65
	22	Pasuruan	4,89

	23	Sidoarjo	4,86
	24	Tuban	6,10
	25	Lamongan	4,55
	26	Gresik	5,77
	27	Bangkalan	4,78
	28	Sampang	4,01
	29	Pamekasan	3,91
	30	Sumenep	3,45
	31	Probolinggo	5,34
	32	Pasuruan	5,23
	33	Surabaya	5,39
	34	Tangerang	5,94
	35	Serang	4,27
	36	Kota Cilegon	6,71
		Rata-rata	4,56
Pesisir Selatan	37	Sukabumi	3,98
	38	Cianjur	3,71
	39	Garut	3,79
	40	Tasikmalaya	3,57
	41	Ciamis	4,22
	42	Cilacap	4,96
	43	Kebumen	3,05
	44	Purworejo	4,55
	45	Kulon Progo	4,36
	46	Bantul	4,24
	47	Gunung Kidul	3,64
	48	Pacitan	3,23
	49	Trenggalek	5,96
	50	Tulungagung	5,01
	51	Blitar	5,13
	52	Lumajang	4,62
	53	Jember	4,72
	54	Banyuwangi	4,68
	55	Pandeglang	4,72
	56	Lebak	3,48
		Rata-rata	4,28
Non Pesisir	57	Bogor	5,34
	58	Bandung	5,44
	59	Kuningan	3,90
	60	Majalengka	3,84
	61	Sumedang	4,17
	62	Purwakarta	3,62
	63	Kota Bogor	6,02
	64	Kota Sukabumi	5,73
	65	Kota Bandung	7,36
	66	Bekasi	5,49

67	Depok	6,52
68	Banyumas	4,01
69	Purbalingga	3,97
70	Banjarnegara	2,87
71	Wonosobo	2,63
72	Magelang	4,35
73	Boyolali	3,83
74	Klaten	4,12
75	Sukoharjo	3,94
76	Wonogiri	3,60
77	Karanganyar	5,54
78	Sragen	4,46
79	Grobogan	4,10
80	Blora	3,52
81	Kudus	5,23
82	Semarang	3,52
83	Temanggung	3,51
84	Magelang	3,66
85	Surakarta	5,49
86	Salatiga	2,61
87	Sleman	4,94
88	Yogyakarta	4,63
89	Ponorogo	4,20
90	Kab. Kediri	4,08
91	Kab. Malang	4,77
92	Bondowoso	4,51
93	Mojokerto	4,73
94	Jombang	5,01
95	Nganjuk	5,03
96	Kab. Madiun	4,01
97	Magetan	4,12
98	Ngawi	3,88
99	Bojonegoro	4,80
100	Kota Kediri	2,64
101	Kota Blitar	5,96
102	Kota Malang	5,01
103	Kota Mojokerto	6,17
104	Kota Madiun	5,45
105	Tangerang	6,47
	Rata-rata	4,55

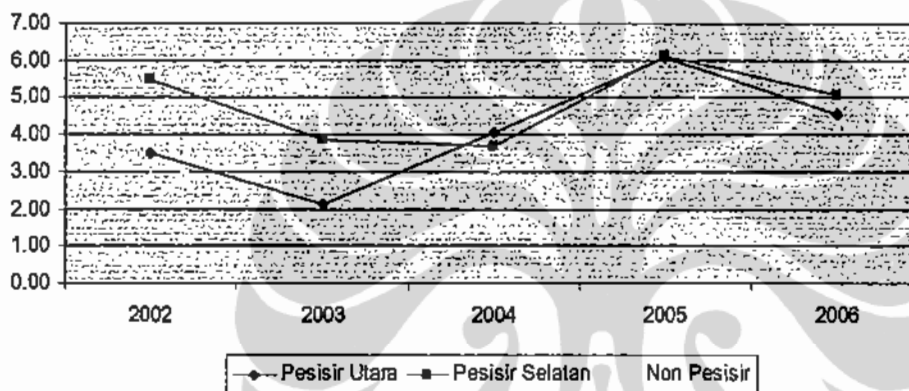
Sumber: BPS, diolah

4.2 Kesejahteraan Masyarakat Pulau Jawa

PDRB perkapita, merupakan ukuran kemakmuran dalam masyarakat, dalam hal ini PDRB perkapita penduduk di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan

dari Rp. 5,424,895 pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 6,463,445 pada tahun 2006 (harga konstan 2000) dengan rata-rata 5,897,815. PDRB per kapita tertinggi dalam kurun waktu 2002-2006 terjadi di wilayah pesisir utara yaitu 6,003,201 pada tahun 2002 menjadi Rp 7,244,379 pada tahun 2006 atau dengan rata-rata 6,550,215.87. Sedangkan PDRB per kapita terendah di wilayah pesisir selatan dari 3,467,227 pada tahun 2002 menjadi 4,310,779 pada tahun 2006 atau dengan rata-rata 3,758,639.

Gambar 4.2 Perkembangan PDRB per kapita di Pulau Jawa



Dari grafik diatas terlihat kedinamisan pertumbuhan PDRB per kapita dari ketiga wilayah. Pada tahun 2003 mengalami pelambatan dan terus naik sampai tahun 2005 dan kembali sedikit melambat pada tahun 2006.

Untuk lebih melihat kontribusi dari masing-masing kabupaten/kota dalam pembentukan PDRB per kapita bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2
PDRB per kapita Terendah dan Tertinggi dari masing-masing wilayah tahun 2002-2006

Wilayah	Tertinggi		Terendah	
	Kab/Kota	Rp	Kab/Kota	Rp
Pesisir Utara	Cilegon	36.093.454	Tegal	1.888.579
Pesisir Selatan	Cilacap	5.873.047	Kebumen	1.937.072
Non Pesisir	Kota Kediri	72.305.798	Grobogan	1.884.025
Rata-rata	5.897.815			

Sumber: BPS, diolah

Dari tabel diatas terlihat dalam 5 tahun terakhir wilayah pesisir utara PDRB per kapita tertinggi dimiliki oleh Kota Cilegon dengan sebagai kota yang berbasis industri, sedangkan terendah adalah kabupaten Tegal dengan PDRB per

kapita sebesar Rp 1.888.579. Wilayah pesisir selatan kemakmuran yang dinikmati tertinggi terjadi di kabupaten Cilacap yaitu sebesar Rp 5.873.047, nilai ini terendah dibandingkan wilayah pesisir utara maupun non pesisir. Selanjutnya wilayah non pesisir, Kota Kediri memiliki PDRB per kapita terbesar yaitu Rp 72.305.798, kondisi ini juga disebabkan kota Kediri mempunyai perekonomian yang berbasis industri. Yang menarik dari data diatas terlihat PDRB per kapita terendah pada masing-masing wilayah terlihat tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sehingga dari data tersebut kesejahteraan ditentukan oleh struktur perekonomian yang dominan di wilayah tersebut.

4.3 Struktur Perekonomian Wilayah Pesisir

Untuk lebih melihat lebih jauh sektor mana yang dominan pada wilayah tertentu adalah dengan melihat PDRB secara sektoral. Tabel berikut menunjukkan sektor mana yang paling mendominasi pada wilayah tertentu.

Tabel 4.3
Rata-rata Persentase Struktur Perekonomian di Pulau Jawa tahun 2002-2006

No	Wilayah	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pesisir Utara	23.9	2.8	25.5	2.2	5.3	21.2	6.3	4.1	8.5
2.	Pesisir Selatan	36.1	2.7	13.5	0.8	4.3	19.8	5.8	5.2	12.5
3.	Non Pesisir	21,8	0,94	21,9	1,64	5,2	22,7	6,7	6,0	12,2

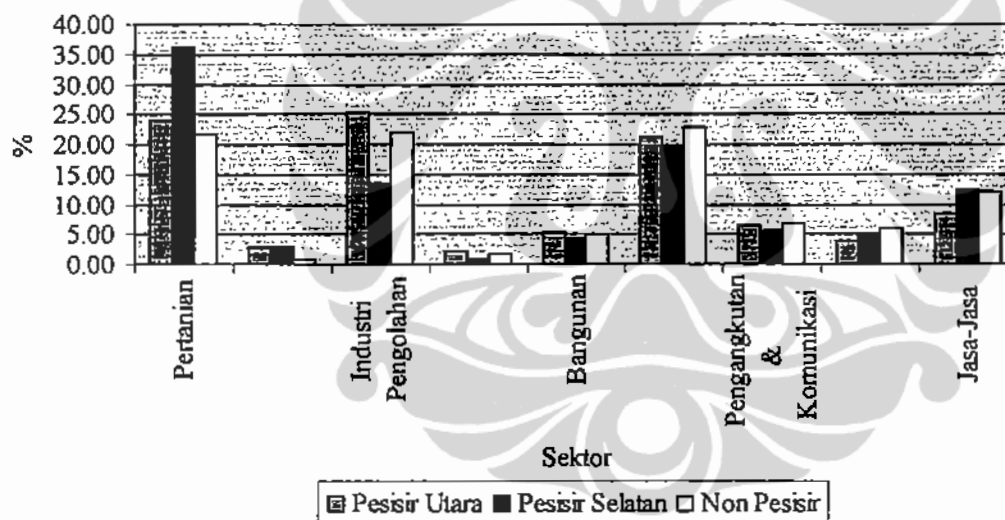
Keterangan :

1. Pertanian
2. Pertambangan/Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan
9. Jasa-jasa

Pada tabel diatas terlihat pada wilayah pesisir utara sektor yang paling mendominasi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 23,9 % dan berikutnya adalah sektor pertanian. Ini memperjelas alasan tingginya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita pada wilayah pesisir utara

disebabkan oleh struktur perekonomian yang berperan dominan yaitu industri pengolahan. Wilayah pesisir selatan yang berperan dominan adalah sektor pertanian dengan andil sebesar 36,1 %, angka ini cukup besar mendominasi dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Ini semakin memperkuat penyebab kontribusi perekonomian di wilayah pesisir selatan adalah pertanian dan pariwisata. Lain halnya dengan wilayah non pesisir, beberapa sektor yang mendominasi yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant menunjukkan kontribusi yang merata yaitu berkisar 20 – 25 %, sehingga bisa dipastikan pada wilayah non pesisir, output daerah di dukung oleh ketiga sektor tersebut secara merata.

Gambar 4.3
Struktur Perekonomian Wilayah Pesisir dan Non Pesisir di Pulau Jawa Tahun 2002-2006



Dari tabel diatas, terlihat sektor-sektor yang dominan pada masing-masing wilayah.

Untuk melihat masing-masing Kabupaten yang berkontribusi untuk PDRB masing-masing daerah adalah pada tabel 4.4. Dimana di wilayah pesisir utara sektor pertanian terbesar terjadi di kabupaten Pamekasan dengan andil sebesar 57 %. Sedangkan sektor industri pengolahan tertinggi terjadi di Kabupaten Bekasi sebesar 80,7 %. Hal ini disebabkan kabupaten bekasi sebagai pusat perekonomian yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta. Selanjutnya kabupaten Probolinggo memiliki sektor perdagangan, hotel dan restaurant tertinggi di wilayah pesisir utara yaitu 36,9 %.

Wilayah pesisir selatan tertinggi untuk sektor pertanian adalah kabupaten Garut sebesar 51,7 %. Sedangkan kabupaten Cilacap menempati urutan tertinggi di sektor industri pengolahan, hal ini disebabkan adanya pabrik pengolahan minyak mentah di daerah ini. Tulung Agung merupakan kabupaten daerah yang mempunyai sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tertinggi dengan kontribusi sebesar 29,2 %. Diperkirakan kontribusi terbesar berasal dari perdagangan marmer. (BPS, 2008)

Tabel 4.4
Rata-rata Persentase Struktur Perekonomian di Pulau Jawa tahun 2002-2006

No	Wilayah	Pertanian	Ind. pengolahan	Perdag, Hotel & Rest
1.	Pesisir Utara			
	Pamekasan	57,0		
	Bekasi		80,7	
	Probolinggo			36,9
2.	Pesisir Selatan			
	Garut	51,7		
	Cilacap		63,2	
	Tulung Agung			29,2
3.	Non Pesisir			
	Blora	52,96		
	Kota Kediri		73,3	
	Kota Sukabumi			42,73

Untuk wilayah non pesisir, sektor pertanian berasal dari kabupaten Blora sebesar 52,96 %. Sedangkan Kota Kediri mempunyai kontribusi sebesar 73,3 % besarnya sektor ini disebabkan di Kota Kediri cukup berkembang industri kecil dan menengah. Seperti tabel berikut menunjukkan jumlah industri yang tumbuh di kota Kediri sebagai daerah pusat perekonomian yang bersebelahan langsung dengan kota Surabaya.

Tabel 4.5
Jumlah Perusahaan Industri Dan Tenaga Kerja Serta Nilai Produksi
Menurut Sub Sektor Industri di Kota Kediri Tahun 2002

No.	SUB SEKTOR	UNIT	PEKERJA	NILAI PRODUKSI
1.	Industri Logam dan mesin	109	664	6.439.158
2.	Industri Kimia	68	465	6.388.522
3.	Industri Aneka	87	1.217	6.278.560
4.	Industri Kecil	193	557	4.386.180
5.	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	321	45.590	890.926.691

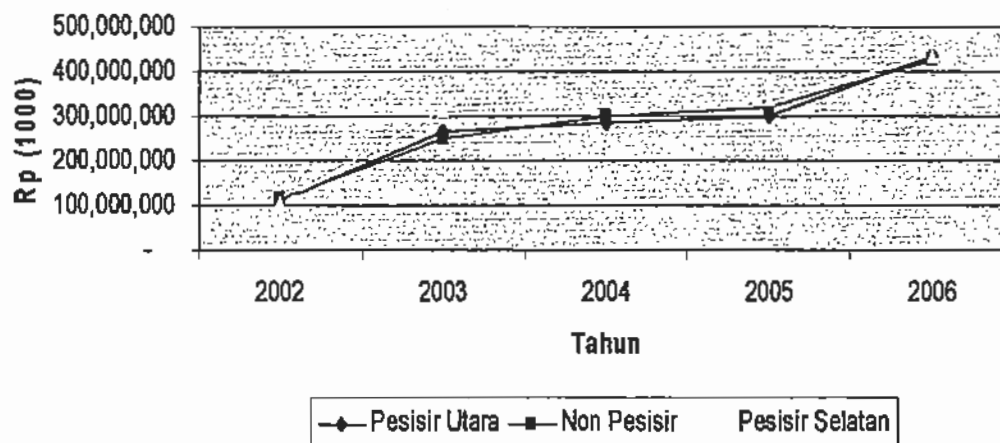
Sumber: Disperindag Kota Kediri, 2001

Kota Sukabumi mempunyai kontribusi yang besar untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran disebabkan kota ini telah ditetapkan sebagai kota jasa atau transit wisata (www.gerbang.jabar.go.id)

4.4 Pengeluaran Pembangunan

Anggaran pembangunan sangat menentukan untuk jalannya perekonomian suatu daerah. Terutama untuk daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai potensi sumber daya alam. Dari grafik berikut dapat dibandingkan rata-rata besarnya anggaran pembangunan pada masing-masing wilayah selama tahun 2002-2006.

Gambar 4.4
Perbandingan anggaran pembangunan wilayah Pesisir dan Non Pesisir di
Jawa



Dengan membandingkan ketiga wilayah terlihat grafik mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu terjadinya kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2003 dan tahun 2006. Kenaikan tahun 2002 disebabkan adanya otonomi daerah sehingga pemerintah menaikkan hampir semua pengeluaran pembangunan di semua daerah.

Hampir disetiap tahun besarnya anggaran pembangunan yang dikucurkan pemerintah sedikit lebih tinggi dialokasikan untuk wilayah pesisir selatan. Ini juga sejalan dengan kondisi bahwa kabupaten/kota yang berada di wilayah ini mendapat dukungan yang lebih dari pemerintah. Sedangkan untuk wilayah pesisir utara dan non pesisir tidak berbeda nyata besarnya anggaran pembangunan.

Tabel berikut menunjukkan besarnya anggaran pembangunan yang diberikan pemerintah pada kabupaten/kota.

Tabel 4.6
Anggaran Pembangunan Terendah dan Tertinggi dari masing-masing wilayah tahun 2002-2006

Wilayah	Tertinggi		Terendah	
	Kab/Kota	Rp (1000)	Kab/Kota	Rp (1000)
Pesisir Utara	Kt Surabaya	984.785.427	Demak	85.260.086
Pesisir Selatan	Jember	473.661.833	Cianjur	193.350.544
Non Pesisir	Kt. Yogya	899.805.401	Mojokerto	75.797.211
Rata-rata	285,250,313			

Sumber: BPS, data diolah

Dari tabel diatas terlihat, anggaran pembangunan tertinggi pemerintah untuk daerah yang berada di wilayah pesisir utara yaitu Kota Surabaya sebesar Rp 984.785.427 sedangkan yang terendah alokasi untuk kabupaten Demak dengan nilai Rp 85.260.086. Wilayah pesisir selatan terlihat Kabupaten Jember mempunyai alokasi anggaran pembangunan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 473.661.833 sedangkan yang terendah yaitu kabupaten Cianjur Rp 193.350.544. Berdasarkan perbedaan antara alokasi anggaran tertinggi dan terendah di wilayah pesisir terjadi ketimpangan yang kecil. Wilayah non pesisir alokasi anggaran pembangunan tertinggi dikucurkan oleh kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 899.805.401 dan yang terendah adalah Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar Rp 75.797.211. Dari angka tersebut terjadi ketimpangan yang cukup besar di wilayah pesisir selatan.

4.5 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja sangat berperan penting dalam mengejar pertumbuhan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan angkatan kerja Jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Sehingga dengan mengkaji angkatan kerja pada masing-masing wilayah dapat dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap penduduk usia kerja dan pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas mereka yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Selama periode penelitian tahun 2002 – 2006, pertumbuhan tenaga kerja di pulau Jawa mengalami pasang surut seiring dengan naik turunnya kondisi perekonomian di Pulau Jawa.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Pulau Jawa dalam tahun 2002 berjumlah 49,96 juta meningkat menjadi 55,06 juta. Apabila dilihat dari sisi pertumbuhannya menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja adalah sebesar 0,76 % per tahun. Tabel berikut menunjukkan jumlah tenaga kerja pada masing-masing wilayah

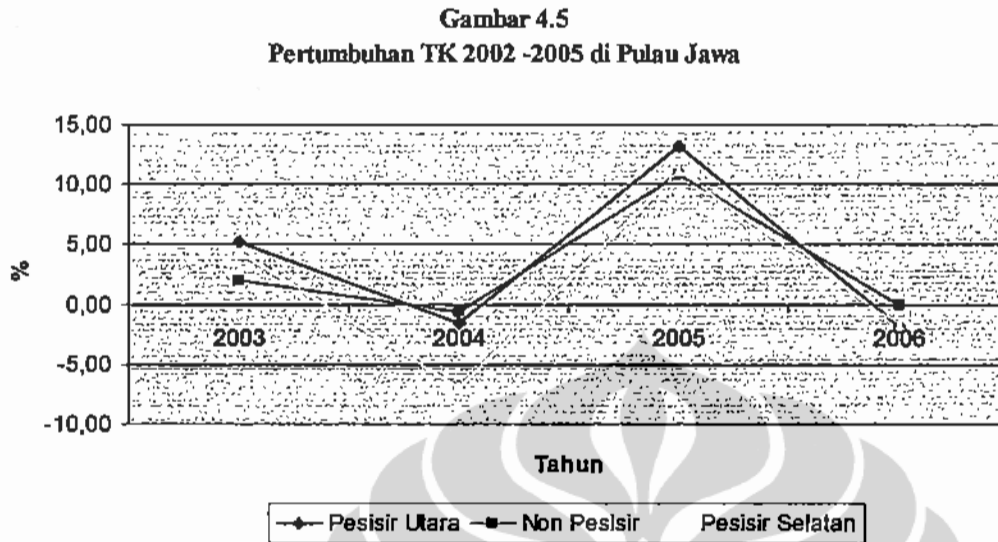
Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Tahun 2002-2006 (Jiwa)

No	Wilayah	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pesisir Utr	16.865.607	17.709.366	17.334.146	19.622.242	19.232.884
2.	Pesisir Sltn	10.900.606	11.337.793	10.449.286	11.668.631	11.405.058
3.	Non Pesisir	22.198.303	22.683.562	22.232.367	24.489.186	24.418.973
	Total	49.964.516	51.730.721	50.015.799	55.780.058	55.056.916

Sumber : BPS, data diolah

Dari tabel diatas terlihat jumlah tenaga kerja dari tahun 2002 ke tahun 2005 mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, sehingga bisa diasumsikan terjadi pengangguran yang cukup besar ketika terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja. Untuk lebih jelas melihat pertumbuhan tenaga kerja pada masing-masing wilayah dapat dilihat dari grafik

pertumbuhan tenaga kerja pada masing-masing wilayah dapat dilihat dari grafik :



Dari grafik diatas terlihat pada tahun 2004 terjadi penurunan pertumbuhan tenaga kerja, kemudian pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan bahkan melewati pertumbuhan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan pertumbuhan, walaupun tidak serendah tahun 2004. Kabupaten/kota yang paling tinggi dan terendah pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Pertumbuhan Tenga Kerja Terendah dan Tertinggi Dari Masing-Masing Wilayah Tahun 2002-2006

Wilayah	Tertinggi		Terendah	
	Kab/Kota	%	Kab/Kota	%
Pesisir Utara	Sampang	10,96	Rembang	-0,45
Pesisir Selatan	Blitar	7,53	Kulon Progo	-3,92
Non Pesisir	Jombang	8,26	Bandung	-1,56
Rata-rata	3,04			

Sumber: Susenas BPS, data diolah

Apabila dilihat pertumbuhan rata-rata tertinggi di wilayah pesisir utara adalah Sampang yang mencapai 10,96 %, Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pulau Jawa yang mencapai 3,04 % sedangkan pertumbuhan rata-rata terendah di Kabupaten Rembang sebesar -0,45 %.

Sama halnya dengan pesisir utara, wilayah Pesisir Selatan dan Non Pesisir pertumbuhan tenaga kerja tertinggi justru bukan di kota besar, ini menunjukkan daerah-daerah dengan basis industri rentan dengan pengangguran. Hal ini terlihat

dari Kota Bandung yang pertumbuhan tenaga kerja turun hingga -1,56 %. Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan pada tahun 2004 pertumbuhan melambat hingga -8,27 %. Walaupun 2 tahun terakhir sudah terjadi pertumbuhan tenaga kerja yang mencapai 2,74 %.

4.6 Sub Sektor Perikanan

Untuk menganalisa sub sektor perikanan yang berperan dalam pembentukan PDRB pada masing-masing wilayah, maka diambil nilai dari sektor pertanian yang didalamnya terbagi dalam lima sub sektor :

- a. Tanaman Bahan Makanan
- b. Tanaman Perkebunan
- c. Peternakan dan Hasil-hasilnya
- d. Kehutanan
- e. Perikanan

Selama periode 2002 -2006 sub sektor perikanan secara nasional mengalami kenaikan sebesar 15,5 %. Untuk melihat sumbangan sub sektor perikanan di pulau Jawa khususnya wilayah pesisir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Share Sub Sektor Perikanan di Pulau Jawa Selama Tahun 2002-2006
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000

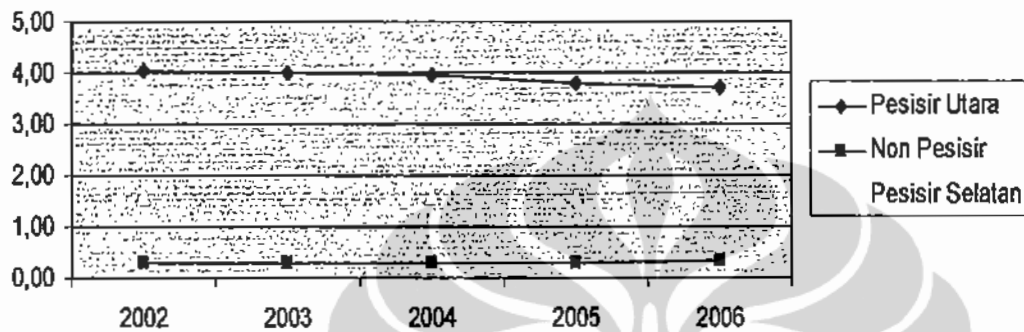
No	Wilayah	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pesisir Utr	4,03	3,98	3,96	3,81	3,71
2.	Pesisir Sltn	1,59	1,58	1,57	1,57	1,60
3.	Non Pesisir	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31
	Total	1,78				

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada wilayah pesisir utara pertumbuhan sub sektor perikanan yang lebih besar dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Dengan rata-rata share perikanan terhadap PDRB di Pulau Jawa mencapai 1,78 %, menunjukkan kecilnya sumbangan perikanan terhadap output secara nasional. Wilayah pesisir utara menunjukkan terjadinya penurunan share perikanan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Wilayah pesisir selatan cenderung statis dan agak meningkat di tahun 2006. Sedangkan wilayah non

perikanan hanya terjadi kenaikan 0,01 % pada tahun 2003 dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung statis.

Gambar 4.6
Share perikanan terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2002-2006



Dari grafik diatas terlihat perbedaan share perikanan antara pesisir utara dengan dua wilayah lainnya, dimana pesisir utara menunjukkan kontribusi yang besar bahkan jika digabungkan untuk kedua wilayah lainnya belum bisa menyamai output perikanan di wilayah pesisir utara. Untuk melihat lebih lanjut daerah mana yang paling tinggi memberikan sumbangan perikanan pada wilayah pesisir atau non pesisir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Share Sub Sektor Perikanan Terendah dan Tertinggi Dari Masing-Masing Wilayah Tahun 2002-2006

Wilayah	Tertinggi		Terendah	
	Kab/Kota	%	Kab/Kota	%
Pesisir Utara	Sumenep	15,49	Cilegon	0,06
Pesisir Selatan	Pandeglang	4,02	Gunung Kidul	0,31
Non Pesisir	Purbalingga	1,27	Kota Surakarta	0,0001
Rata-rata	1,78			

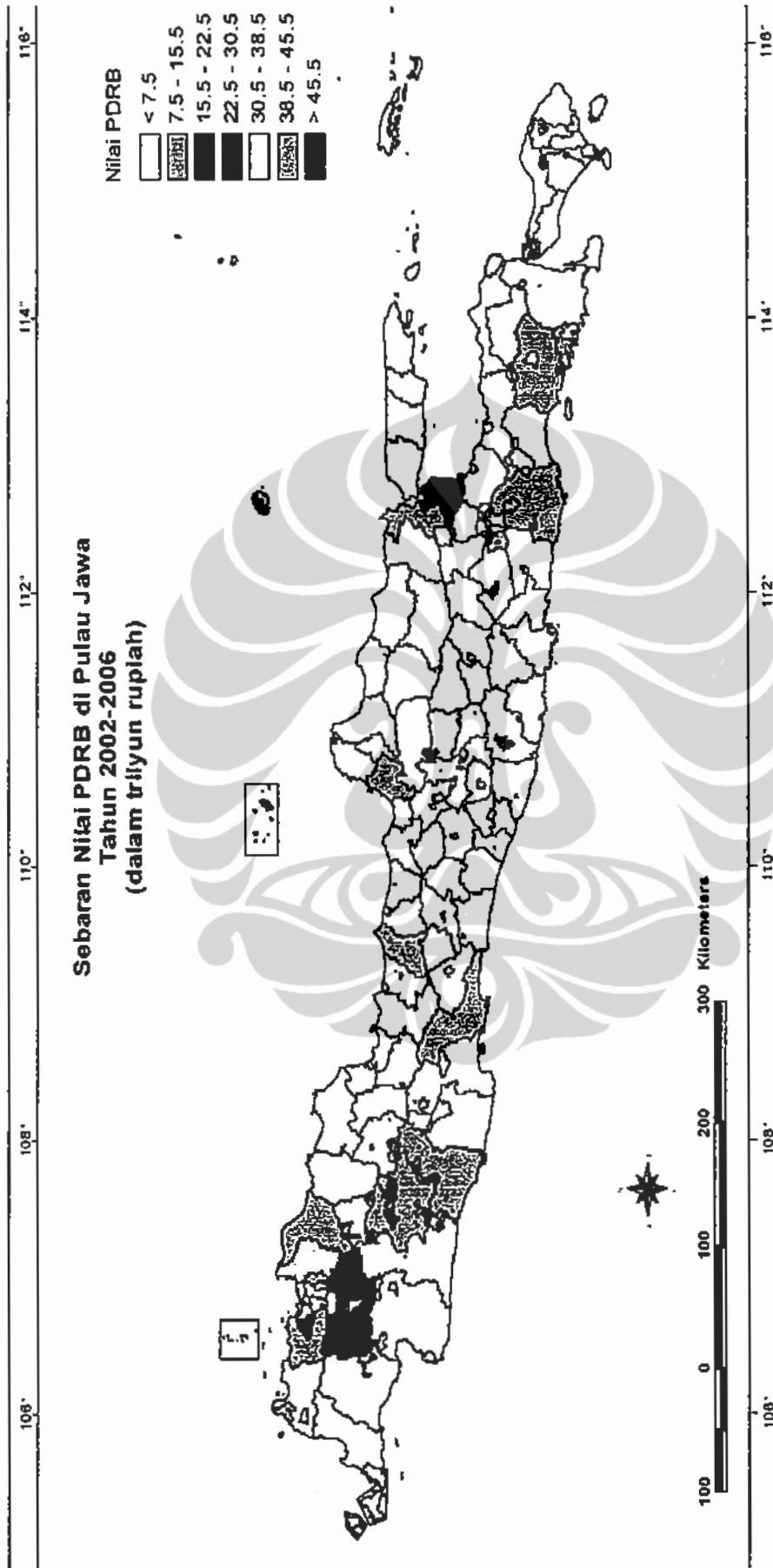
Sumber: Susenas BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat di kabupaten Sumenep mempunyai share perikanan tertinggi pada wilayah pesisir utara yaitu mencapai 15,49 %, bahkan tertinggi di bandingkan wilayah lainnya. Sedangkan Cilegon yang pada ulasan sebelumnya terlihat mempunyai pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita

yang tertinggi hanya mempunyai 0,06 % share perikanan terhadap PDRB daerahnya. Untuk wilayah pesisir selatan share tertinggi dimiliki kabupaten Pandeglang sebesar 4,02 % dan terendah terjadi di kabupaten Gunung Kidul yang hanya mencapai 0,31 %. Wilayah non pesisir share tertinggi dicapai kabupaten Purbalingga yaitu 1,27 % lebih rendah dari rata-rata keseluruhan pulau Jawa yaitu 1,78 %, hal ini dapat dipahami karena wilayah non pesisir atau tengah pulau Jawa tidak mempunyai sumberdaya laut. Sehingga output yang diperoleh hanya berasal dari budiya air tawar dan hasil olahan lebih lanjut.



Gambar 4.7 Sebaran Nilai PDRB di Pulau Jawa (Rp Trilyun)



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil estimasi koefisien parameter variabel persamaan regresi mengenai hubungan antara PDRB Kabupaten/Kota di Pulau Jawa terhadap variabel-variabel pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja selama periode penelitian.

Pembahasan yang akan disajikan pada bagian ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *eviews 5.1* dengan data panel yang merupakan gabungan *cross section weight* 104 kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan data *time series* dari tahun 2002 sampai dengan 2006.

5.1 Uji Parsial, Uji Model dan Uji Koefisien Determinasi

Hasil estimasi koefisien-koefisien persamaan regresi akan ditampilkan berdasarkan estimasi menganggap wilayah Pulau Jawa adalah satu kesatuan tanpa membedakan mana daerah pesisir utara, selatan dan non pesisir. Setiap model data panel akan diestimasi parameternya dengan beberapa teknik:

Dari hasil pengujian terhadap linear atau tidaknya data karena kenyataannya tidak semua sebaran data mempunyai bentuk linier, maka model ditransformasi menjadi model semi log sehingga menjadi:

$$\ln \text{PDRB} = \alpha + \beta \ln \text{PEM} + \beta \ln \text{TK} + \beta \text{RPRIK} + u$$

Dimana :

PDRB : PDRB masing-masing Kab/Kota di Pulau Jawa

PEM : Total Pengeluaran pembangunan Kab/Kota

TK : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun

RPRIK : Share subsektor perikanan terhadap total PDRB wilayah

Dari hasil regresi persamaan dengan menggunakan *Pooled Least Squares* maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.1
 Hasil Estimasi Terhadap Variabel-Variabel Penentu PDRB Kab/Kota Di Jawa
 Tahun 2002-2006

Variabel	OLS		
	Koefisien	t-statistik	Nilai Probabilitas
(1)	(2)		(3)
Konstanta	3.841207	4.807813	0.0000*
Ln PEM	0.235398	5.255158	0.0000*
Ln TK	0.531127	10.96734	0.0000*
Ln RPRIK	-0.036200	-3.296181	0.0010*
R ²	0.342		
R ² -adjust	0.338		

Keterangan:

* = signifikan pada taraf nyata 1 %

Hasil regresi yang diperoleh terbukti semua variabel signifikan pada taraf nyata $\alpha = 1$ %. Mengingat variabel pada model berbentuk logaritma maka koefisien variabel di baca sebagai elastisitas. Nilai koefisien untuk pengeluaran pemerintah memiliki arti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 % akan meningkatkan PDRB sebesar 0,23 %. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menduga adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB/output. Bahwa menurut Susanti, dkk (2007) pengeluaran pembangunan akan meningkat dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner, yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional.

Berikutnya koefisien tenaga kerja menunjukkan adanya korelasi positif terhadap PDRB, yaitu setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 % akan meningkatkan PDRB sebesar 0,53%. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis bahwa adanya hubungan positif antara tenaga kerja dengan output. Terutama di negara berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Akibatnya penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Tentunya yang menjadi masalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja kan terus meningkatkan output. Penanggulangannya dengan melibatkan teknologi padat modal tetapi konsekwensinya menciutnya kesempatan kerja.

Variabel ketiga yaitu adalah subsektor perikanan terhadap total PDRB terlihat mempunyai korelasi negatif dengan PDRB. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis bahwa subsektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB nasional bahkan dibandingkan dengan kelompok sektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.. Hal ini dapat dipahami bahwa walaupun subsektor perikanan cukup besar kontribusinya dalam PDB tetapi penyumbang terbesar berasal dari luar wilayah Jawa. Hal ini disebabkan subsektor perikanan di Jawa sudah mengalami *overfishing*. Hubungan negatif subsektor perikanan terhadap PDRB dikarenakan andilnya yang makin berkurang dalam perekonomian.

Overfishing adalah terjadinya laju peningkatan upaya penangkapan tidak sebanding dengan pertumbuhan alami sumberdaya ikan, sehingga stok ikan akan berkurang dan akhirnya mengakibatkan turunnya hasil tangkapan nelayan. Di sisi lain, penurunan produksi akan menurunkan penerimaan dan pendapatan nelayan sehingga kemungkinan akan mengalami kerugian (Nikijuluw et al., 2000). Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) RI pada 2004 berdasarkan kajian stok sumber daya ikan juga menetapkan Laut Jawa sebagai perairan *overfishing* bahkan sampai (171,72 %). Sehingga wajar jika jumlah tangkapan sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu menurut Susanti, dkk (2007) dengan rendahnya peran sektor pertanian menandakan telah terjadi perubahan struktur produksi akibat terjadinya perekonomian yang tumbuh. Dengan terjadinya transformasi ini maka terjadi pergeseran keunggulan komparatif dari sektor pertanian ke sektor di luar sektor pertanian. Sehingga dengan hasil estimasi diatas membuktikan pula bahwa telah terjadi transformasi struktur di Pulau Jawa.

5.2 Metode *Dummy* Dengan Beberapa Variabel Kualitatif

Estimasi ini dilakukan untuk melihat regresi untuk daerah pesisir utara Jawa, Pesisir Selatan Jawa dan Non Pesisir , maka persamaan menjadi :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D1_j + \alpha_3 D2_i + \beta_{2i} \ln PEM_{it} + \beta_{3i} \ln TK_{it} + \beta_{4i} RPRIK_{it} + u$$

Dimana :

$PDRB_{it}$: PDRB untuk kab/kota ke $-i$ dan waktu ke- t (dalam juta Rp)

- $\alpha_2 D1_i$: Koefisien untuk daerah Pesisir Utara
 $\alpha_3 D2_i$: Koefisien untuk daerah pesisir selatan
 PEMit : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
 TK_{it} : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
 RPRIK : Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t

Penyelesaian model dengan menggunakan eviews melalui prosedur pooled data. Dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.

Dari persamaan regresi diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.2 Hasil Estimasi Dengan Menggunakan Metode *Dummy*

Variabel	<i>Dummy</i>		
	Koefisien	t-statistik	Nilai Probabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	3.590947	4.663244	0.0000*
D1	0.486718	5.981082	0.0000*
D2	-0.074842	-0.867878	0.3859**
Ln PEM	0.229856	5.351426	0.0000*
Ln TK	0.552739	11.75534	0.0000*
Ln RPRIK	-0.079272	-6.272189	0.0000*
R ²	0.397		
R ² -adjust	0.391		

Keterangan:

* = signifikan pada taraf nyata 1 %

** = tidak signifikan pada taraf nyata 10 %

Setelah dilakukan regresi terhadap persamaan diatas diperoleh koefisien variabel bebas yang signifikan pada taraf $\alpha = 1 \%$, kecuali koefisien dummy daerah pesisir selatan yang tidak signifikan pada taraf $\alpha = 5 \%$. Angka ini menunjukkan bahwa daerah pesisir selatan jawa tidak signifikan sebagai penyumbang PDRB di wilayah Jawa.

Dummy pesisir selatan yang tidak signifikan pada taraf 5 % menunjukkan wilayah dalam kelompok pesisir selatan tidak mampu menjelaskan secara signifikan besaran variabel terikat yang akan diperoleh oleh wilayah pesisir selatan ini.

Variabel pengeluaran pembangunan berkorelasi positif dengan PDRB dengan selisih nilai koefisien yang kecil yaitu 0,01 dengan persamaan OLS/*common*. Begitu pula variabel tenaga kerja berkorelasi positif dan mempunyai selisih 0.02 dengan persamaan OLS. Sedangkan variabel share sub sektor perikanan tidak ada perubahan korelasi sehingga masih tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini semakin mempertegas bahwa dengan dibaginya wilayah Jawa dengan pesisir, non pesisir dan pesisir selatan maka share subsektor perikanan tidak memberikan sumbangan untuk PDRB di wilayah Jawa baik pesisir selatan maupun pesisir utara.

Selain itu dengan regresi metode diatas diperoleh PDRB untuk daerah non pesisir sebesar konstantanya yaitu 3,59 sedangkan PDRB untuk daerah pesisir sebesar konstanta non pesisir ditambah dengan nilai D1 yaitu sebesar 0,48 % sehingga PDRB untuk daerah pesisir utara melalui model ini diperkirakan 4,07 % dan untuk daerah pesisir selatan lebih kecil dari daerah non pesisir sebesar 0.07 % sehingga diperoleh PDRB untuk daerah pesisir utara adalah 3,52.%.

5.3 Model dengan menggunakan metode variabel *dummy*

Jenis ini termasuk estimasi pada grup. Model ini memiliki variasi untuk semua koefisien slope dan intersep masing-masing wilayah. Sehingga pada masing-masing wilayah pesisir utara, selatan dan non pesisir diperoleh gambaran dan hubungan dengan masing-masing variabel bebasnya. Model ekonometri disusun sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D1_i + \alpha_3 D2_i + \beta_2 \ln PEM_{it} + \beta_3 \ln TK_{it} + \beta_4 RPRIK_{it} + \gamma_1 (D1 \ln PEM_t) + \gamma_2 (D1 \ln TK_t) + \gamma_3 (D1 RPRIK_t) + \gamma_4 (D2 \ln PEM_t) + \gamma_5 (D2 \ln TK_t) + \gamma_6 (D2 RPRIK_t) + \epsilon_{it}$$

$PDRB_{it}$: PDRB untuk kab/kota ke -i dan waktu ke-t (dalam juta Rp)

$\alpha_2 D1_i$: Koefisien untuk daerah Pesisir Utara

$\alpha_3 D2_i$: Koefisien untuk daerah pesisir selatan

PEM_{it} : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t

- TK_{it} : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
- RPRIK : Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t
- D1PEM : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- D1TK : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- D1RPRIK : Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir utara
- D2PEM : Total Pengeluaran pembangunan untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan
- D2TK : Tenaga kerja yang bekerja diatas 15 tahun untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan
- D2RPRIK : Share subsektor perikanan terhadap total PDRB untuk Kab/Kota ke-i dan waktu ke-t untuk daerah pesisir Selatan

Penyelesaian model diatas didekati dengan menggunakan *eviews* melalui prosedur *pooled data*. Dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.

Adapun hasil estimasinya adalah tabel berikut :

Tabel 5.3 Hasil Estimasi Dengan Meggunakan Variabel *Dummy*

Variabel	Variabel <i>Dummy</i>		
	Koefisien	t-statistik	Nilai Probabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)
Konstanta	4.781243	4.426278	0.0000*
D1	-2.797755	-1.703152	0.0892**
D2	-8.774868	-3.158806	0.0017*
Ln PEM	0.217009	3.774355	0.0002*
Ln TK	0.482010	7.489442	0.0000*
Ln RPRIK	-0.185143	-1.664353	0.0967***
D1LnPEM	0.195611	1.995197	0.0466**
D1LnTK	-0.040168	-0.396157	0.6922
D1R	0.111665	0.997423	0.3190
D2LnPEM	-0.179362	-1.607146	0.1086
D2LnTK	0.930779	5.289959	0.0000*
D2R	0.026923	0.206557	0.8364
R ²	0.439		
R ² -adjust	0.427		

Keterangan:

- * = signifikan pada taraf nyata 1 %
- ** = signifikan pada taraf nyata 5 %
- *** = signifikan pada taraf nyata 10 %

Dari persamaan variabel bebas diatas terlihat banyaknya interpretasi yang bisa digambarkan untuk model ini. Terlihat untuk daerah non pesisir koefisien pengeluaran pemerintah yang berkorelasi positif dengan PDRB, sama halnya dengan tenaga kerja. Kedua varibel bebas ini masih konsisten walaupun dengan menggunakan metode ini bahwa sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini semakin memperkuat bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja baik secara keseluruhan maupun dengan dipecah menjadi 3 wilayah tetap menunjukkan hubungan signifikan dan korelasi yang sesuai dengan hipotesis. Sebaliknya koefisien variabel share subsektor perikanan masih menunjukkan korelasi negatif dengan PDRB wilayah yang bertolak belakang dari hipotesis awal.

Selain itu terlihat variabel pengeluaran pemerintah dan varibel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan pada taraf nyata dibawah $\alpha = 5 \%$, sedangkan varibel share subsektor perikanan tidak signifikan pada taraf $\alpha = 5 \%$ sehingga di daerah non pesisir bisa diestimasi subsektor perikanan bukan penyumbang yang bisa memberi dampak pada meningkatnya PDRB di daerah non pesisir.

Untuk daerah pesisir utara terlihat hanya varibel pengeluaran pemerintah signifikan pada taraf nyata $\alpha = 5 \%$ sehingga untuk wilayah pesisir utara jawa hanya bisa diterangkan oleh variabel pengeluaran pemerintah. Korelasi yang terjadi juga terlihat positif antara pengeluaran pemerintah dengan terbentuknya PDRB di suatu wilayah, hal ini juga sesuai dengan hipotesis awal adanya campur tangan pemerintah di daerah ini akan membantu peningkatan output daerah.

Variabel tenaga kerja pada daerah pesisir tidak signifikan pada taraf nyata $\alpha = 5 \%$ hal ini menunjukkan tidak berpengaruhnya variabel tenaga kerja terhadap PDRB. Walaupun bertanda negatif tetapi tenaga kerja di wilayah pesisir utara tidak mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap PDRB. Ini bisa dijelaskan pada teori fungsi produksi, bahwa pada permulaannya apabila tenaga kerja yang digunakan ditambah, dan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, tingkat produksi akan bertambah dengan cepat. Tetapi kemudian akibat dari berlakunya

hukum hasil yang lebih semakin berkurang, tambahan produksi yang diciptakan oleh tenaga kerja yang berikut makin lama akan menjadi makin bertambah kecil. Apabila pertambahan tenaga kerja terus dilakukan, pada suatu ketika tambahan tenaga kerja yang dipekerjakan tidak akan menghasilkan tambahan produksi. Dan sesudah itu pertambahan tenaga kerja akan mengurangi tingkat produksi. (Sukirno, 2007).

Share subsektor perikanan terhadap PDRB justru menunjukkan korelasi positif yang berarti sub sektor perikanan pada daerah pesisir mampu memberikan sumbangan pada PDRB daerah walaupun tidak signifikan bisa meningkatkan PDRB. Sehingga dibandingkan ketiga wilayah non pesisir dan pesisir selatan lainnya terbukti koefisien terbesar ada di daerah wilayah pesisir utara Jawa.

Untuk daerah pesisir selatan terlihat hanya variabel tenaga kerja yang menunjukkan signifikan pada taraf nyata $\alpha = 5\%$ sehingga untuk wilayah pesisir selatan Jawa PDRB hanya bisa diterangkan oleh tenaga kerja. Hubungan yang terjadi terlihat positif, bahwa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja pada wilayah pesisir selatan akan meningkatkan PDRB di wilayahnya.

Share sub sektor perikanan maupun pengeluaran pemerintah pada wilayah ini juga menunjukkan korelasi yang negatif, yang berarti subsektor perikanan di wilayah pesisir selatan tidak memberikan andil dalam pembentukan PDRB di wilayahnya. Walaupun hal ini tidak bisa menjelaskan lebih nyata karena tidak signifikan dalam taraf $\alpha = 5\%$

Dari regresi diatas terlihat bahwa intersep terbesar berada di daerah non pesisir, sehingga dengan adanya perubahan pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan share perikanan maka akan memperoleh PDRB sebesar 4,78 %. Artinya di ketiga wilayah tersebut PDRB tertinggi berada pada daerah non pesisir di pulau Jawa. Selanjutnya diikuti oleh daerah pesisir utara dengan konstanta sebesar 1,98 % sedangkan untuk wilayah pesisir selatan konstantanya sangat rendah yaitu -3,99 %.

Untuk variabel pengeluaran pemerintah terlihat koefisien paling besar adalah pada wilayah pesisir utara yaitu sebesar 0,41 % dan paling rendah ada pada wilayah pesisir selatan yang hanya bernilai 0,03 %.

Variabel tenaga kerja memberikan konstanta yang terbesar pada wilayah pesisir selatan sebesar 1,41 % dan terendah pada wilayah pesisir utara yaitu 0,44 %. Sehingga antara tenaga kerja pada daerah pesisir utara dan non pesisir hampir sama besaran nilai tenaga kerja.

Variabel share perikanan menghasilkan konstanta terbesar pada wilayah pesisir utara sebesar 0,33 %, sedangkan pada daerah non pesisir terlihat share perikanan masih rendah yaitu -0,18 bahkan paling rendah ada pada wilayah pesisir selatan. Sehingga bisa diperkirakan bahwa subsektor perikanan terbesar ada di wilayah pesisir utara diikuti wilayah non pesisir dan wilayah selatan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini diperoleh bahwa daerah pesisir utara lebih menghasilkan output/PDRB lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Diikuti wilayah non pesisir, sedangkan yang paling rendah adalah wilayah pesisir selatan Jawa.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara PDRB dengan pengeluaran pemerintah, hal ini sesuai dengan hipotesis, sehingga dengan adanya pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam menyumbang PDRB wilayahnya.
3. Pengaruh tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan PDRB ini berkaitan dengan faktor tenaga kerja memberikan nilai guna pada faktor produksi lain seperti modal dan tanah, sehingga peningkatan tenaga kerja yang produktif akan meningkatkan output (PDRB)
4. Share subsektor perikanan berpengaruh negatif terhadap peningkatan output, artinya andil perikanan yang semakin berkurang terhadap perekonomian. Hal ini disebabkan terjadinya *overfishing* pada area penangkapan ikan di pesisir pulau Jawa dan terjadinya transformasi struktural penduduk di pulau Jawa yaitu mulai beralihnya dari sektor pertanian ke sektor industri. Dengan adanya peningkatan share perikanan nasional terhadap PDB membuktikan share perikanan di Jawa hanya memberikan kontribusi yang kecil dibandingkan wilayah lain di luar Jawa.
5. Pengeluaran pembangunan signifikan dalam pembentukan output hanya pada wilayah non pesisir dan wilayah pesisir utara sedangkan wilayah pesisir selatan tidak signifikan dan menunjukkan hubungan yang negatif dengan pembentukan PDRB
6. Variabel tenaga kerja hanya berpengaruh signifikan pada daerah pesisir selatan dan non pesisir dengan korelasi positif dalam membentuk output

wilayahnya. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh tenaga kerja hanya pada wilayah non pesisir dan pesisir selatan, sehingga diperkirakan tidak signifikannya tenaga kerja di wilayah pesisir utara disebabkan wilayah pesisir utara umumnya dipenuhi oleh kegiatan yang padat modal tetapi tidak padat karya sehingga tidak terjadi peningkatan pertumbuhan tenaga kerja

7. Share perikanan pada wilayah pesisir utara pulau Jawa dengan metode koefisien acak menunjukkan korelasi positif dalam kontribusi output wilayahnya tetapi korelasi ini tidak signifikan dalam menumbuhkan perekonomian di wilayahnya. Kontribusi terbesar ada pada wilayah utara, diikuti dengan wilayah pesisir selatan. Sedangkan daerah non pesisir menunjukkan hubungan negatif dengan pembentukan PDRB

6.2 Saran

1. Rendahnya share perikanan pada wilayah Jawa memerlukan peran pemerintah dalam mendorong usaha perikanan melalui budidaya untuk mengatasi terjadinya *overfishing* di Pulau Jawa, sehingga tidak mengandalkan sumberdaya yang tersedia.
2. Diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi melalui peningkatan elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan serendah mungkin. Dengan adanya transformasi ke sektor industri mengindikasikan akan menyerap sedikit tenaga kerja dan membutuhkan teknologi tepat guna, sehingga perlu di rangsang tumbuhnya lapangan pekerjaan yang padat karya.

6.3 Keterbatasan Studi

Mengingat keterbatasan ketersediaan data, waktu, biaya dan cakupan analisis yang digunakan, penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Beberapa keterbatasan antara lain :

1. Karena ketiadaan data investasi swasta berupa PMTB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) yang digunakan untuk menentukan

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi maka diproksi dengan data pengeluaran pembangunan.

2. Variabel-variabel bebas yang digunakan relatif tidak banyak, sehingga ada kemungkinan estimasi model tidak efisien. Disarankan untuk penelitian selanjutnya data mencakup variabel yang lebih banyak dan menggunakan kurun waktu yang lebih lama.

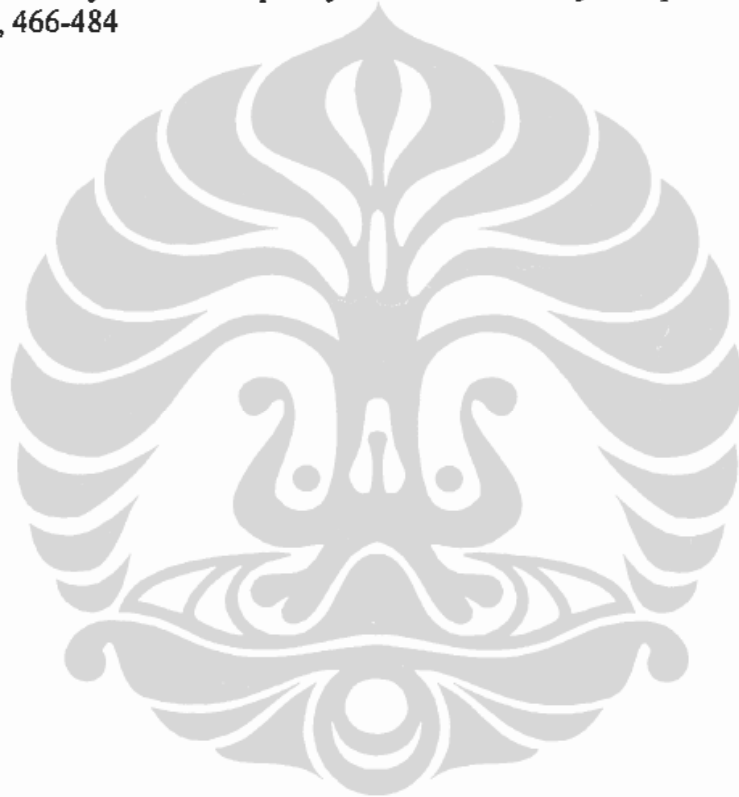


DAFTAR REFERENSI

- Akita, Takahiro. (2003). Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia using Two Stage Nested Decomposition Method. *Journal The Annals of Regional Science* 37: 55-57
- Arif Budiman.(1995) *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 Hal 2-8
- Aziz, Iwan J. (1993). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya*. UI Press. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, (2006). *Buku Propinsi Jawa Timur dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Surabaya
- (2007) *Buku Jawa Barat dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Bandung
- (2006). *Buku Jawa Tengah dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Semarang
- (2006). *Buku Banten dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Banten
- 2007. *Survey Sosial Ekonomi Nasional Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik. Surabaya
- Baltagi, Badi H and Song, Seuck Heun (2006). Unbalances Panel Data : A survey. *Statistical Papers*, 47, 493 -523
- Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Kelompok Kompas-Gramedia, Jakarta
- Bellante, Don dan Mark Janson. *Ekonomi ketenagakerjaan*, Wimanjaya K. Liotolu dan M.Yasin, penerjemah; Prathama Rahardja, editor, Jakarta:Lembaga Penerbit FHUI, Terjemahan dari:Labor Economic, Choice in Labor Markets, Second Edition.
- Blanchard. (2003). *Macroeconomics*. Prentice Hall. United States of America
- Crawford et all.,(1999). A Comparison of Level of Development Among Coastal and Non-Coasal Comuunities in North sulawesi and South Sumatera. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources* Vol 2 (1)
- Djojohadikusumo (1994). *Dasar teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Perkembangan pemikiran Ekonomi*. LP3ES, Jakarta
- Departemen Kelautan dan Perikanan (2006). *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jakarta
- GujaratiDamodar. (1978). *Dasar-dasar ekonometrika*, Erlangga, Jakarta

- Harmadi, Sonny H.B.(2007) *Pengangguran, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Makalah ini disampaikan pada Konvensi Kampus IV dan Temu Tahunan ke-10 Forum Rektor Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Bandung,
- Hutagalung, Saut P dkk. (2007). *Sewindu DKP Mengawal Pembangunan Negara Kepulauan*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan. PT Raja Grafindo persada, Jakarta
- Nurmanaf, Achmad R. (1999). *Kesenjangan Pengeluaran Pembangunan antar wilayah dan Propinsi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVII Nomor 4
- Nurdjaman, Arsyad, dkk. (1992). *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia
- Nazara, Suahasil. (1994). *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia, 1985-1991*. Prisma 8 – 1994 : 19
- Pyndick and Rubinfeld.(1997). *Econometrics Models & Econometrics Forecasts*.Mc. Graw Hill Internationals,New York.
- Rahayu, M.G Ana Budi. (2006). *Analisis Kesenjangan Wilayah Pesisir dan Non Pesisir dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah* Tesis MPKP FE UI tidak dipublikasikan.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. (2004). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Riyanto.(2003). *Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB tidak dipublikasikan
- Saptarini Dian, dkk. (1995). *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan. Jakarta.
- Sukirno, (2004). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Susanti, Hera, Iksan Moh dan Widyanti. (2000). *Indikator-Indikator Makroekonomi Edisi Kedua*. LP FEUI, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Todaro, (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke tiga*, PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Tambunan. T.T.H. (2003). *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yang, dali L (1991). China Adjust to the World Economy : the Political Economy of China's Coastal Development Strategy. *Journal of Pacific Affairs* vol 64 No.1, 42-64
- Yao Shuzie and Zhang Zongyi (2001). On Regional Inequality and Diverging Clubs : A Case Study of Contemporary China. *Journal of Comparative Economics*, 29, 466-484



Lampiran 1
Data Hasil Penelitian

KAB/KOTA	TAHUN	PDRB	d1	d2	PEM	TK	RPRIK
Bogor	2002	21.385.613	0	0	250.388.969	1.251.513	0,401
Bogor	2003	22.421.165	0	0	314.883.767	1.266.496	0,397
Bogor	2004	23.671.429	0	0	378.492.270	1.340.253	0,389
Bogor	2005	25.056.365	0	0	416.555.875	1.399.531	0,387
Bogor	2006	26.546.186	0	0	605.617.913	1.453.567	0,368
Sukabumi	2002	6.217.918	0	1	150.452.307	814.993	1,871
Sukabumi	2003	6.451.325	0	1	366.938.732	827.849	1,866
Sukabumi	2004	6.707.001	0	1	469.802.497	823.478	1,848
Sukabumi	2005	6.997.620	0	1	433.249.611	831.625	1,851
Sukabumi	2006	7.276.404	0	1	672.649.459	787.261	1,798
Cianjur	2002	6.094.911	0	1	107.484.899	861.556	2,327
Cianjur	2003	6.318.986	0	1	168.674.534	842.236	2,355
Cianjur	2004	6.569.797	0	1	172.554.801	775.245	2,387
Cianjur	2005	6.820.520	0	1	451.228.346	821.876	2,424
Cianjur	2006	7.048.229	0	1	66.810.138	875.530	2,339
Bandung	2002	14.038.969	0	0	271.684.566	1.650.208	1,871
Bandung	2003	14.738.379	0	0	776.813.224	1.593.234	1,866
Bandung	2004	15.575.482	0	0	900.472.051	1.461.516	1,848
Bandung	2005	16.480.263	0	0	904.941.359	1.483.108	1,851
Bandung	2006	17.439.994	0	0	1.288.177.869	1.542.607	1,798
Garut	2002	7.880.905	0	1	69.937.180	816.833	1,469
Garut	2003	8.093.894	0	1	471.743.999	817.447	1,471
Garut	2004	8.418.445	0	1	476.548.497	816.476	1,448
Garut	2005	8.768.410	0	1	514.990.736	869.415	1,448
Garut	2006	9.128.808	0	1	786.102.332	812.163	1,429
Tasikmalaya	2002	3.901.466	0	1	50.874.850	884.419	2,542
Tasikmalaya	2003	4.035.623	0	1	358.829.846	968.876	2,663
Tasikmalaya	2004	4.177.562	0	1	405.858.302	671.641	2,728
Tasikmalaya	2005	4.337.406	0	1	430.563.646	685.583	2,776
Tasikmalaya	2006	4.511.372	0	1	675.048.651	760.904	2,647
Ciamis	2002	5.077.645	0	1	59.745.574	779.254	1,201
Ciamis	2003	5.284.081	0	1	453.474.266	819.093	1,261
Ciamis	2004	5.514.288	0	1	425.722.458	684.812	1,146
Ciamis	2005	5.766.618	0	1	439.863.900	721.554	1,125
Ciamis	2006	5.988.339	0	1	229.597.223	727.902	1,135
Kuningan	2002	2.844.196	0	0	50.670.571	412.854	0,762
Kuningan	2003	2.943.731	0	0	323.011.149	447.434	0,817
Kuningan	2004	3.060.812	0	0	308.635.969	435.484	0,862
Kuningan	2005	3.181.732	0	0	362.409.060	434.762	0,877
Kuningan	2006	3.308.676	0	0	501.513.659	513.934	0,857
Cirebon	2002	5.487.853	1	0	139.136.064	748.454	5,082

Cirebon	2003	5.709.752	1	0	387.852.076	799.165	5,222
Cirebon	2004	5.976.519	1	0	403.106.582	804.608	5,302
Cirebon	2005	6.278.806	1	0	433.740.005	826.834	5,285
Cirebon	2006	6.599.686	1	0	613.383.789	778.446	4,986
Majalengka	2002	2.972.409	0	0	80.652.257	522.053	0,663
Majalengka	2003	3.063.510	0	0	349.233.301	561.700	0,668
Majalengka	2004	3.194.210	0	0	323.106.259	495.728	0,676
Majalengka	2005	3.336.985	0	0	397.873.857	504.676	0,666
Majalengka	2006	3.479.254	0	0	567.869.089	527.927	0,616
Sumedang	2002	3.979.481	0	0	33.867.464	426.623	0,508
Sumedang	2003	4.133.003	0	0	296.966.662	455.354	0,543
Sumedang	2004	4.311.331	0	0	312.296.630	414.520	0,577
Sumedang	2005	4.506.201	0	0	349.640.524	419.145	0,559
Sumedang	2006	4.694.276	0	0	468.977.292	468.113	0,538
Indramayu	2002	5.131.022	1	0	128.263.069	66.076	14,861
Indramayu	2003	5.374.451	1	0	443.486.765	760.086	14,201
Indramayu	2004	5.597.845	1	0	418.613.278	766.150	13,783
Indramayu	2005	5.835.640	1	0	477.165.769	785.442	13,465
Indramayu	2006	6.132.973	1	0	617.641.160	730.300	12,805
Subang	2002	4.489.734	1	0	87.762.118	581.097	2,681
Subang	2003	4.723.895	1	0	313.858.381	607.774	2,576
Subang	2004	4.966.821	1	0	230.879.669	568.643	2,779
Subang	2005	5.248.665	1	0	306.836.148	581.525	2,708
Subang	2006	5.488.929	1	0	486.277.171	578.167	2,622
Purwakarta	2002	5.191.883	0	0	60.353.534	298.041	0,621
Purwakarta	2003	5.348.159	0	0	169.004.959	293.253	0,816
Purwakarta	2004	5.547.110	0	0	217.732.370	281.010	0,969
Purwakarta	2005	5.741.814	0	0	236.547.960	280.400	1,126
Purwakarta	2006	5.963.995	0	0	322.946.665	287.061	1,183
Karawang	2002	11.573.566	1	0	140.859.084	669.408	0,912
Karawang	2003	11.929.751	1	0	372.106.773	670.314	0,905
Karawang	2004	12.768.746	1	0	421.018.960	624.351	0,814
Karawang	2005	13.513.175	1	0	425.980.328	650.133	0,793
Karawang	2006	14.315.099	1	0	674.974.959	714.152	0,734
Bekasi	2002	34.497.719	1	0	245.512.246	606.149	0,134
Bekasi	2003	36.393.830	1	0	451.872.725	675.975	0,137
Bekasi	2004	38.451.579	1	0	530.101.843	696.764	0,130
Bekasi	2005	40.695.508	1	0	444.932.643	720.896	0,124
Bekasi	2006	43.127.393	1	0	665.774.006	742.586	0,118
KtBogor	2002	2.986.837	0	0	70.715.051	306.309	0,061
KtBogor	2003	3.168.186	0	0	271.918.426	271.194	0,058
KtBogor	2004	3.361.439	0	0	218.901.909	264.216	0,055
KtBogor	2005	3.567.232	0	0	272.396.192	272.459	0,052
KtBogor	2006	3.782.274	0	0	376.777.910	295.731	0,050
KtSukabumi	2002	1.202.799	0	0	47.709.166	79.946	0,142
KtSukabumi	2003	1.267.583	0	0	160.322.243	78.020	0,149

KtSukabumi	2004	1.340.714	0	0	173.136.391	84.378	0,143
KtSukabumi	2005	1.420.505	0	0	181.716.359	89.816	0,141
KtSukabumi	2006	1.509.019	0	0	252.816.225	94.518	0,132
KtBandung	2002	17.226.733	0	0	186.605.248	804.558	0,057
KtBandung	2003	18.490.721	0	0	461.090.313	823.375	0,053
KtBandung	2004	19.874.813	0	0	578.490.326	869.022	0,036
KtBandung	2005	21.370.696	0	0	699.558.994	878.590	0,034
KtBandung	2006	22.930.103	0	0	839.469.146	915.120	0,033
KtCirebon	2002	4.241.695	1	0	59.941.220	101.601	0,149
KtCirebon	2003	4.422.635	1	0	166.931.663	102.885	0,152
KtCirebon	2004	4.628.702	1	0	179.574.806	105.984	0,153
KtCirebon	2005	4.854.898	1	0	198.530.862	106.786	0,156
KtCirebon	2006	5.123.738	1	0	323.991.260	103.077	0,147
KtBekasi	2002	10.019.136	0	0	189.210.139	660.493	0,008
KtBekasi	2003	10.545.455	0	0	343.255.325	654.005	0,008
KtBekasi	2004	11.112.519	0	0	364.115.050	656.493	0,008
KtBekasi	2005	11.739.946	0	0	458.366.586	696.384	0,008
KtBekasi	2006	12.452.714	0	0	564.653.297	722.304	0,007
KtDepok	2002	3.924.054	0	0	123.079.537	408.010	0,435
KtDepok	2003	4.169.755	0	0	256.406.319	459.532	0,416
KtDepok	2004	4.440.877	0	0	305.493.634	512.775	0,397
KtDepok	2005	4.750.034	0	0	330.812.108	497.860	0,382
KtDepok	2006	5.066.129	0	0	403.599.125	520.608	0,366
Cilacap	2002	8.780.074	0	1	83.176.137	678.947	2,158
Cilacap	2003	9.178.789	0	1	120.967.464	689.164	1,622
Cilacap	2004	9.631.459	0	1	400.502.703	682.522	1,368
Cilacap	2005	10.145.144	0	1	465.298.358	671.210	1,255
Cilacap	2006	10.602.338	0	1	709.158.563	623.337	1,314
Banyumas	2002	3.227.485	0	0	53.384.317	646.789	1,103
Banyumas	2003	3.347.158	0	0	49.980.784	676.460	1,150
Banyumas	2004	3.486.634	0	0	375.462.492	659.555	1,141
Banyumas	2005	3.598.399	0	0	420.329.420	689.850	1,136
Banyumas	2006	3.759.548	0	0	432.626.793	633.495	1,120
Purbalingga	2002	1.730.319	0	0	79.176.241	356.175	1,218
Purbalingga	2003	1.784.728	0	0	97.515.407	389.681	1,206
Purbalingga	2004	1.844.532	0	0	216.202.858	401.860	1,246
Purbalingga	2005	1.921.654	0	0	214.979.308	386.859	1,283
Purbalingga	2006	2.018.808	0	0	299.386.069	368.613	1,386
Banjarnegara	2002	2.081.096	0	0	72.254.261	389.897	0,971
Banjarnegara	2003	2.110.733	0	0	250.459.918	411.679	0,928
Banjarnegara	2004	2.191.163	0	0	239.828.315	413.948	0,986
Banjarnegara	2005	2.277.618	0	0	269.788.681	426.180	0,913
Banjarnegara	2006	2.375.975	0	0	351.339.546	404.700	0,921
Kebumen	2002	2.199.785	0	1	109.304.222	474.938	0,893
Kebumen	2003	2.264.331	0	1	353.793.077	544.699	0,827
Kebumen	2004	2.291.022	0	1	172.480.655	482.194	0,660

Kebumen	2005	2.364.469	0	1	110.386.024	502.926	0,609
Kebumen	2006	2.460.673	0	1	256.759.091	498.905	0,878
Purworejo	2002	2.050.805	0	1	23.118.185	328.701	1,227
Purworejo	2003	2.125.412	0	1	289.399.562	360.545	1,230
Purworejo	2004	2.214.137	0	1	271.322.460	335.226	1,215
Purworejo	2005	2.321.543	0	1	233.248.938	337.933	1,189
Purworejo	2006	2.442.927	0	1	341.767.960	341.982	1,202
Wonosobo	2002	1.453.827	0	0	72.024.498	372.533	0,868
Wonosobo	2003	1.487.044	0	0	118.440.261	378.144	0,872
Wonosobo	2004	1.521.807	0	0	347.902.524	371.435	0,882
Wonosobo	2005	1.570.348	0	0	310.108.392	400.729	0,875
Wonosobo	2006	1.621.132	0	0	375.879.260	368.456	0,869
Magelang	2002	2.867.362	0	0	38.048.546	586.010	0,644
Magelang	2003	2.982.476	0	0	64.032.544	562.834	0,641
Magelang	2004	3.102.727	0	0	105.097.569	593.522	0,648
Magelang	2005	3.245.979	0	0	121.231.407	549.552	0,622
Magelang	2006	3.405.369	0	0	231.763.931	593.600	0,596
Boyolali	2002	3.062.304	0	0	72.739.290	375.136	0,321
Boyolali	2003	3.211.066	0	0	77.127.224	358.974	0,285
Boyolali	2004	3.320.737	0	0	95.621.712	373.407	0,369
Boyolali	2005	3.456.062	0	0	39.646.622	389.337	0,348
Boyolali	2006	3.600.898	0	0	119.992.850	371.685	0,478
Klaten	2002	3.612.899	0	0	40.845.718	48.651	0,305
Klaten	2003	3.791.474	0	0	41.662.904	48.557	0,297
Klaten	2004	3.975.793	0	0	97.491.825	53.580	0,299
Klaten	2005	4.158.205	0	0	89.620.022	54.346	0,302
Klaten	2006	4.253.788	0	0	139.270.396	57.164	0,296
Sukoharjo	2002	3.490.382	0	0	30.829.455	491.368	0,138
Sukoharjo	2003	3.629.051	0	0	117.218.403	496.698	0,143
Sukoharjo	2004	3.786.213	0	0	330.284.396	464.810	0,154
Sukoharjo	2005	3.941.788	0	0	347.934.020	502.366	0,171
Sukoharjo	2006	4.120.437	0	0	418.854.725	509.602	0,163
Wonogiri	2002	2.182.650	0	0	45.488.856	562.770	0,286
Wonogiri	2003	2.237.791	0	0	111.533.537	578.652	0,281
Wonogiri	2004	2.329.471	0	0	384.450.499	526.319	0,281
Wonogiri	2005	2.426.038	0	0	401.955.545	604.888	0,274
Wonogiri	2006	2.524.759	0	0	441.915.233	557.425	0,264
Karanganyar	2002	3.546.613	0	0	36.180.578	388.176	0,107
Karanganyar	2003	3.746.320	0	0	122.797.669	392.099	0,107
Karanganyar	2004	3.970.279	0	0	272.222.027	402.733	0,105
Karanganyar	2005	4.188.330	0	0	239.886.330	407.445	0,105
Karanganyar	2006	4.401.302	0	0	329.281.443	412.009	0,103
Sragen	2002	2.030.755	0	0	45.470.823	400.296	0,995
Sragen	2003	2.104.533	0	0	247.932.074	422.274	0,945
Sragen	2004	2.208.294	0	0	249.084.358	416.456	0,951
Sragen	2005	2.322.239	0	0	225.466.991	443.724	0,932

Sragen	2006	2.442.570	0	0	370.613.613	401.629	0,915
Grobogan	2002	2.321.920	0	0	54.470.823	412.206	0,152
Grobogan	2003	2.372.923	0	0	109.572.470	471.663	0,155
Grobogan	2004	2.462.661	0	0	266.422.470	445.994	0,156
Grobogan	2005	2.579.283	0	0	380.917.829	436.622	0,161
Grobogan	2006	2.682.749	0	0	474.204.294	436.506	0,159
Blora	2002	1.504.996	0	0	53.360.284	216.858	0,101
Blora	2003	1.554.412	0	0	94.446.363	208.894	0,111
Blora	2004	1.612.705	0	0	238.080.318	225.720	0,111
Blora	2005	1.678.274	0	0	259.549.615	237.888	0,115
Blora	2006	1.742.963	0	0	418.266.900	234.330	0,115
Rembang	2002	1.637.137	1	0	61.954.021	530.289	6,647
Rembang	2003	1.686.410	1	0	311.151.248	503.884	6,942
Rembang	2004	1.762.800	1	0	321.788.188	539.426	6,839
Rembang	2005	1.825.561	1	0	340.757.117	527.299	6,260
Rembang	2006	1.926.563	1	0	466.727.801	518.820	6,245
Pati	2002	3.403.606	1	0	131.916.377	420.571	8,362
Pati	2003	3.331.575	1	0	318.351.833	423.150	8,685
Pati	2004	3.473.081	1	0	210.034.704	427.346	7,170
Pati	2005	3.609.798	1	0	276.741.055	435.108	6,287
Pati	2006	3.770.331	1	0	281.585.004	441.007	5,540
Kudus	2002	8.887.863	0	0	60.652.100	270.635	0,026
Kudus	2003	9.382.289	0	0	100.885.637	290.302	0,026
Kudus	2004	10.198.527	0	0	64.770.042	275.706	0,022
Kudus	2005	10.647.408	0	0	59.985.561	274.422	0,023
Kudus	2006	10.867.886	0	0	139.592.309	262.880	0,024
Jepara	2002	3.032.806	1	0	79.714.820	577.940	1,401
Jepara	2003	3.146.839	1	0	76.286.373	615.070	1,275
Jepara	2004	3.272.709	1	0	137.344.959	566.815	1,374
Jepara	2005	3.411.159	1	0	140.795.258	604.896	1,328
Jepara	2006	3.554.051	1	0	201.701.598	567.496	1,330
Demak	2002	2.237.836	1	0	132.436.033	349.819	5,786
Demak	2003	2.300.731	1	0	92.705.369	363.417	5,634
Demak	2004	2.379.486	1	0	43.655.265	374.498	5,719
Demak	2005	2.471.259	1	0	50.642.329	393.626	5,764
Demak	2006	2.570.573	1	0	106.861.433	415.629	5,356
Semarang	2002	4.128.481	0	0	96.792.144	510.364	0,129
Semarang	2003	4.283.285	0	0	269.496.351	447.990	0,133
Semarang	2004	4.345.991	0	0	266.418.154	488.824	0,139
Semarang	2005	4.481.358	0	0	277.266.457	518.014	0,133
Semarang	2006	4.652.042	0	0	382.183.842	505.710	0,131
Temanggung	2002	1.785.133	0	0	91.890.244	591.881	0,136
Temanggung	2003	1.845.222	0	0	98.242.565	642.406	0,143
Temanggung	2004	1.917.584	0	0	158.543.941	583.110	0,167
Temanggung	2005	1.994.173	0	0	331.174.704	700.076	0,168
Temanggung	2006	2.058.354	0	0	78.171.612	665.852	0,212

Kendal	2002	3.949.052	1	0	91.890.244	455.492	2,069
Kendal	2003	4.061.727	1	0	98.242.565	481.874	2,043
Kendal	2004	4.167.626	1	0	158.543.941	462.972	2,035
Kendal	2005	4.277.354	1	0	331.174.704	467.826	2,029
Kendal	2006	4.423.061	1	0	78.171.612	489.526	2,079
Batang	2002	1.833.191	1	0	75.449.313	445.471	2,141
Batang	2003	1.880.020	1	0	181.218.672	482.737	1,763
Batang	2004	1.918.980	1	0	270.576.348	483.208	1,740
Batang	2005	1.972.777	1	0	171.794.601	500.896	1,738
Batang	2006	2.022.301	1	0	372.690.243	472.533	2,254
Pekalongan	2002	2.311.517	1	0	37.900.819	69.539	0,308
Pekalongan	2003	2.396.116	1	0	37.900.765	68.402	0,318
Pekalongan	2004	2.501.230	1	0	103.947.822	71.235	0,337
Pekalongan	2005	2.600.856	1	0	104.617.856	73.987	0,337
Pekalongan	2006	2.710.378	1	0	145.574.899	73.038	0,364
Pemalang	2002	2.473.722	1	0	58.476.539	614.436	1,693
Pemalang	2003	2.556.576	1	0	361.478.925	599.554	1,668
Pemalang	2004	2.659.855	1	0	461.639.828	570.509	1,618
Pemalang	2005	2.762.252	1	0	461.639.828	633.432	1,587
Pemalang	2006	2.864.681	1	0	369.528.745	633.308	1,567
Tegal	2002	2.414.200	1	0	168.052.755	407.602	0,257
Tegal	2003	2.547.921	1	0	243.034.323	417.627	0,267
Tegal	2004	2.682.690	1	0	288.827.331	403.044	0,258
Tegal	2005	2.809.340	1	0	268.969.985	445.515	0,270
Tegal	2006	2.957.779	1	0	406.534.746	465.682	0,273
Brebes	2002	3.773.041	1	0	65.985.764	295.650	2,761
Brebes	2003	3.956.229	1	0	61.795.065	315.667	2,805
Brebes	2004	4.147.511	1	0	180.196.546	311.574	2,995
Brebes	2005	4.346.424	1	0	177.374.423	327.212	3,189
Brebes	2006	4.551.197	1	0	238.684.395	306.552	3,252
KtMagelang	2002	782.362	0	0	85.997.486	364.314	0,034
KtMagelang	2003	811.632	0	0	87.343.995	398.825	0,029
KtMagelang	2004	842.302	0	0	216.290.927	377.210	0,031
KtMagelang	2005	890.399	0	0	193.851.650	400.745	0,030
KtMagelang	2006	908.764	0	0	238.025.718	403.380	0,031
KtSurakarta	2002	3.268.560	0	0	77.569.641	560.808	0,000
KtSurakarta	2003	3.468.277	0	0	138.152.434	570.741	0,000
KtSurakarta	2004	3.669.373	0	0	320.293.068	558.180	0,000
KtSurakarta	2005	3.858.170	0	0	310.758.021	596.701	0,000
KtSurakarta	2006	4.067.530	0	0	479.852.718	576.489	0,000
KtSalatiga	2002	628.444	0	0	105.320.992	586.100	0,015
KtSalatiga	2003	650.264	0	0	323.451.900	590.699	0,014
KtSalatiga	2004	641.139	0	0	339.616.662	601.800	0,015
KtSalatiga	2005	663.171	0	0	329.277.108	632.384	0,015
KtSalatiga	2006	688.938	0	0	447.816.372	604.518	0,015
KtSemarang	2002	14.225.680	1	0	92.149.936	761.597	0,099

KtSemarang	2003	14.830.665	1	0	329.992.542	784.176	0,097
KtSemarang	2004	15.359.727	1	0	209.758.398	779.456	0,096
KtSemarang	2005	16.264.422	1	0	326.627.979	849.566	0,092
KtSemarang	2006	17.167.333	1	0	452.749.977	775.757	0,087
KtPekalongan	2002	1.516.207	1	0	54.985.736	107.511	12,007
KtPekalongan	2003	1.574.764	1	0	17.847.918	112.425	11,750
KtPekalongan	2004	1.638.792	1	0	138.627.502	106.317	12,535
KtPekalongan	2005	1.701.324	1	0	108.658.204	124.993	10,736
KtPekalongan	2006	1.759.417	1	0	114.293.726	115.847	8,988
KtTegal	2002	853.697	1	0	65.408.541	101.618	10,145
KtTegal	2003	903.422	1	0	100.757.653	96.302	8,646
KtTegal	2004	956.244	1	0	123.260.903	99.586	8,017
KtTegal	2005	1.002.822	1	0	112.864.207	106.750	6,625
KtTegal	2006	1.054.499	1	0	197.163.892	103.469	6,430
Kulonprogo	2002	1.284.808	0	1	273.627.898	205.657	0,452
Kulonprogo	2003	1.338.700	0	1	294.899.302	200.736	0,448
Kulonprogo	2004	1.398.744	0	1	312.831.443	189.944	0,446
Kulonprogo	2005	1.465.477	0	1	329.894.385	203.664	0,464
Kulonprogo	2006	1.524.848	0	1	353.874.603	172.824	0,442
GunungKidul	2002	2.444.306	0	1	369.344.000	403.670	0,311
GunungKidul	2003	2.526.516	0	1	384.880.000	405.282	0,320
GunungKidul	2004	2.613.238	0	1	411.290.000	408.807	0,326
GunungKidul	2005	2.726.389	0	1	432.237.000	395.542	0,319
GunungKidul	2006	2.830.583	0	1	460.647.000	405.680	0,286
Sleman	2002	4.374.022	0	0	753.680.000	426.403	0,649
Sleman	2003	4.596.227	0	0	799.596.000	434.490	0,659
Sleman	2004	4.837.376	0	0	811.212.000	407.236	0,716
Sleman	2005	5.080.563	0	0	845.321.000	476.196	0,774
Sleman	2006	5.309.059	0	0	899.624.000	462.745	0,819
KtYogyakarta	2002	3.812.425	0	0	802.111.502	173.982	0,026
KtYogyakarta	2003	3.993.837	0	0	865.144.096	170.101	0,022
KtYogyakarta	2004	4.195.392	0	0	892.482.583	172.380	0,021
KtYogyakarta	2005	4.399.902	0	0	943.405.028	192.698	0,015
KtYogyakarta	2006	4.574.051	0	0	995.883.794	198.916	0,009
Pacitan	2002	1.080.833	0	1	88.574.798	309.833	1,247
Pacitan	2003	1.111.252	0	1	210.726.530	322.797	1,305
Pacitan	2004	1.148.533	0	1	210.625.247	302.456	1,369
Pacitan	2005	1.191.238	0	1	98.296.848	333.177	1,437
Pacitan	2006	1.241.306	0	1	161.799.932	355.120	1,504
Ponorogo	2002	2.271.918	0	0	94.741.858	435.347	0,126
Ponorogo	2003	2.364.407	0	0	296.338.948	425.819	0,121
Ponorogo	2004	2.466.590	0	0	300.882.397	422.267	0,119
Ponorogo	2005	2.567.909	0	0	292.143.330	530.475	0,115
Ponorogo	2006	2.694.521	0	0	448.857.387	494.814	0,115
Trenggalek	2002	486.807	0	1	79.760.107	336.641	3,716
Trenggalek	2003	513.457	0	1	260.200.128	348.012	3,725

Trenggalek	2004	543.402	0	1	259.047.525	323.548	3,748
Trenggalek	2005	575.002	0	1	275.694.220	397.256	3,793
Trenggalek	2006	612.309	0	1	396.270.368	403.510	3,856
Tulungagung	2002	5.080.611	0	1	57.537.601	451.908	1,357
Tulungagung	2003	5.320.888	0	1	318.946.845	491.089	1,400
Tulungagung	2004	5.588.457	0	1	356.494.133	451.635	1,423
Tulungagung	2005	5.874.963	0	1	86.044.178	590.295	1,446
Tulungagung	2006	6.196.735	0	1	159.781.295	576.487	1,466
Blitar	2002	3.793.937	0	1	46.469.935	502.556	0,523
Blitar	2003	3.998.300	0	1	300.389.364	544.851	0,520
Blitar	2004	4.197.787	0	1	305.644.852	544.684	0,515
Blitar	2005	4.431.529	0	1	347.188.920	652.241	0,508
Blitar	2006	4.688.222	0	1	519.846.482	665.242	0,525
Kediri	2002	4.635.463	0	0	95.519.916	696.709	0,117
Kediri	2003	4.815.356	0	0	393.843.935	750.001	0,120
Kediri	2004	5.017.087	0	0	372.620.884	702.193	0,123
Kediri	2005	5.232.030	0	0	350.085.162	862.827	0,125
Kediri	2006	5.472.438	0	0	586.077.058	856.969	0,129
Malang	2002	9.537.800	0	0	150.763.674	1.170.862	0,212
Malang	2003	9.916.866	0	0	445.464.573	1.176.178	0,218
Malang	2004	10.457.656	0	0	461.419.149	1.110.438	0,340
Malang	2005	10.976.206	0	0	465.338.419	1.422.101	0,344
Malang	2006	11.602.643	0	0	761.298.739	1.366.362	0,342
Lumajang	2002	4.172.515	0	1	85.715.147	475.781	0,803
Lumajang	2003	4.353.045	0	1	281.427.232	518.130	0,796
Lumajang	2004	4.570.180	0	1	292.670.040	463.909	0,857
Lumajang	2005	4.793.734	0	1	304.275.703	567.069	0,886
Lumajang	2006	5.044.176	0	1	427.390.192	546.439	0,895
Jember	2002	7.185.062	0	1	148.181.919	1.036.532	0,946
Jember	2003	7.473.400	0	1	525.151.278	1.019.707	0,965
Jember	2004	7.821.292	0	1	568.325.898	976.386	0,956
Jember	2005	8.236.277	0	1	544.794.703	1.280.945	0,957
Jember	2006	8.705.996	0	1	581.855.365	1.135.821	0,951
Banyuwangi	2002	7.077.230	0	1	77.832.963	733.832	2,480
Banyuwangi	2003	7.371.604	0	1	421.674.391	792.455	2,429
Banyuwangi	2004	7.680.836	0	1	407.201.851	713.872	2,437
Banyuwangi	2005	8.069.263	0	1	412.799.216	962.436	2,430
Banyuwangi	2006	8.533.707	0	1	684.656.285	885.324	2,480
Bondowoso	2002	1.545.576	0	0	94.564.442	357.187	0,174
Bondowoso	2003	1.604.262	0	0	261.690.990	371.415	0,191
Bondowoso	2004	1.684.860	0	0	243.824.511	351.252	0,197
Bondowoso	2005	1.772.844	0	0	243.748.625	441.098	0,193
Bondowoso	2006	1.868.563	0	0	321.116.526	436.596	0,189
Situbondo	2002	2.373.000	1	0	93.131.379	304.815	3,818
Situbondo	2003	2.468.600	1	0	109.103.461	304.654	3,804
Situbondo	2004	2.573.128	1	0	89.736.080	304.281	3,793

Situbondo	2005	2.703.988	1	0	76.403.543	368.495	3,788
Situbondo	2006	2.852.395	1	0	164.821.818	349.032	3,714
Probolinggo	2002	4.500.482	1	0	103.296.339	483.915	1,818
Probolinggo	2003	4.683.602	1	0	260.287.225	498.486	1,908
Probolinggo	2004	4.894.983	1	0	271.485.166	462.511	1,943
Probolinggo	2005	5.126.681	1	0	282.120.934	619.672	1,967
Probolinggo	2006	5.418.555	1	0	389.265.476	633.738	2,003
Pasuruan	2002	4.426.501	1	0	187.453.219	669.588	1,573
Pasuruan	2003	4.617.794	1	0	426.348.999	693.612	1,506
Pasuruan	2004	4.847.571	1	0	426.525.967	665.500	1,422
Pasuruan	2005	5.101.155	1	0	213.659.105	832.401	1,328
Pasuruan	2006	5.403.935	1	0	302.247.237	781.882	1,304
Sidoarjo	2002	17.008.748	1	0	122.375.812	719.657	2,601
Sidoarjo	2003	17.815.205	1	0	477.348.315	747.126	2,371
Sidoarjo	2004	18.793.697	1	0	505.366.566	716.843	2,289
Sidoarjo	2005	19.701.804	1	0	589.511.980	955.243	2,223
Sidoarjo	2006	20.621.960	1	0	871.977.290	924.115	2,140
Mojokerto	2002	3.973.883	0	0	96.688.731	436.295	0,040
Mojokerto	2003	4.132.790	0	0	306.663.256	444.654	0,040
Mojokerto	2004	4.341.533	0	0	282.108.158	393.373	0,039
Mojokerto	2005	4.574.704	0	0	254.574.909	554.324	0,038
Mojokerto	2006	4.825.150	0	0	368.403.124	563.781	0,037
Jombang	2002	4.109.738	0	0	110.607.461	470.411	0,311
Jombang	2003	4.311.449	0	0	328.774.195	492.936	0,318
Jombang	2004	4.531.340	0	0	329.466.992	459.885	0,327
Jombang	2005	4.773.510	0	0	328.900.835	611.069	0,323
Jombang	2006	5.047.095	0	0	389.559.821	623.725	0,320
Nganjuk	2002	3.177.534	0	0	62.206.982	436.420	0,104
Nganjuk	2003	3.320.952	0	0	213.039.707	483.839	0,109
Nganjuk	2004	3.492.408	0	0	276.979.992	467.573	0,109
Nganjuk	2005	3.691.208	0	0	354.952.985	577.525	0,108
Nganjuk	2006	3.912.121	0	0	526.349.590	574.544	0,109
Madiun	2002	1.895.358	0	0	60.069.609	283.123	0,061
Madiun	2003	1.954.805	0	0	207.443.109	297.221	0,066
Madiun	2004	2.022.086	0	0	221.430.784	292.097	0,073
Madiun	2005	2.120.804	0	0	211.356.061	351.329	0,076
Madiun	2006	2.228.541	0	0	338.098.398	346.693	0,078
Magetan	2002	2.219.009	0	0	58.569.042	321.501	0,057
Magetan	2003	2.297.109	0	0	87.261.598	336.064	0,056
Magetan	2004	2.392.633	0	0	81.942.391	320.239	0,055
Magetan	2005	2.507.673	0	0	96.294.142	392.503	0,053
Magetan	2006	2.636.157	0	0	166.227.891	381.968	0,050
Ngawi	2002	2.122.889	0	0	63.027.794	372.922	0,580
Ngawi	2003	2.187.263	0	0	291.974.401	385.023	0,566
Ngawi	2004	2.282.392	0	0	293.383.825	395.465	0,529
Ngawi	2005	2.385.682	0	0	270.913.767	477.291	0,498

Ngawi	2006	2.510.076	0	0	379.536.096	454.760	0,502
Bojonegoro	2002	3.934.269	0	0	95.277.621	559.797	0,321
Bojonegoro	2003	4.099.414	0	0	323.068.738	582.558	0,342
Bojonegoro	2004	4.290.084	0	0	342.421.247	543.181	0,385
Bojonegoro	2005	4.542.629	0	0	369.978.401	690.534	0,395
Bojonegoro	2006	4.810.360	0	0	494.855.639	693.640	0,376
Tuban	2002	3.985.999	1	0	88.872.180	546.677	3,333
Tuban	2003	4.196.577	1	0	308.380.224	549.050	3,148
Tuban	2004	4.453.295	1	0	323.099.989	536.361	2,996
Tuban	2005	4.763.623	1	0	276.336.116	612.161	2,861
Tuban	2006	5.113.001	1	0	461.474.757	587.478	2,720
Lamongan	2002	3.433.155	1	0	85.303.380	566.372	7,513
Lamongan	2003	3.558.823	1	0	279.346.694	640.156	7,234
Lamongan	2004	3.721.540	1	0	305.852.535	595.048	6,977
Lamongan	2005	3.922.476	1	0	343.715.963	735.092	6,678
Lamongan	2006	4.154.130	1	0	495.201.849	707.409	7,108
Gresik	2002	10.044.000	1	0	109.526.582	477.307	4,266
Gresik	2003	10.487.376	1	0	258.895.635	469.375	4,187
Gresik	2004	11.102.199	1	0	297.448.635	462.917	4,090
Gresik	2005	11.892.606	1	0	288.765.635	575.761	3,950
Gresik	2006	12.702.413	1	0	412.837.327	590.058	3,783
Bangkalan	2002	2.360.932	1	0	54.144.559	345.946	2,481
Bangkalan	2003	2.460.179	1	0	239.570.143	417.608	2,429
Bangkalan	2004	2.586.773	1	0	269.726.572	342.515	2,411
Bangkalan	2005	2.730.586	1	0	274.586.584	485.055	2,341
Bangkalan	2006	2.887.161	1	0	394.817.494	480.718	2,275
Sampang	2002	1.886.436	1	0	69.590.974	346.002	10,040
Sampang	2003	1.945.291	1	0	124.979.841	424.365	9,929
Sampang	2004	2.036.343	1	0	97.345.650	373.830	10,693
Sampang	2005	2.134.176	1	0	100.849.510	479.374	10,961
Sampang	2006	2.242.309	1	0	207.755.149	502.798	11,228
Pamekasan	2002	1.437.461	1	0	55.493.680	321.661	7,825
Pamekasan	2003	1.491.977	1	0	222.623.484	375.556	8,335
Pamekasan	2004	1.551.603	1	0	104.299.513	402.601	8,174
Pamekasan	2005	1.621.138	1	0	96.509.193	435.702	8,048
Pamekasan	2006	1.694.484	1	0	203.514.866	461.541	7,829
Sumenep	2002	3.697.447	1	0	313.482.242	517.522	15,356
Sumenep	2003	3.802.190	1	0	391.517.893	574.842	15,470
Sumenep	2004	3.920.685	1	0	378.925.260	590.663	15,708
Sumenep	2005	4.073.592	1	0	364.251.151	688.307	15,539
Sumenep	2006	4.255.989	1	0	566.525.649	662.932	15,354
KtKediri	2002	17.170.932	0	0	61.384.556	111.114	0,001
KtKediri	2003	17.833.779	0	0	164.633.633	104.566	0,001
KtKediri	2004	18.862.157	0	0	156.131.680	113.221	0,001
KtKediri	2005	18.917.695	0	0	202.089.297	133.299	0,001
KtKediri	2006	20.004.870	0	0	313.735.325	132.092	0,001

KtBlitar	2002	486.807	0	0	35.265.126	55.447	0,095
KtBlitar	2003	513.457	0	0	122.258.195	50.296	0,116
KtBlitar	2004	543.402	0	0	135.794.046	51.915	0,113
KtBlitar	2005	575.002	0	0	134.254.894	60.511	0,140
KtBlitar	2006	612.309	0	0	175.536.501	61.208	0,152
KtMalang	2002	8.673.370	0	0	65.830.834	300.971	0,001
KtMalang	2003	9.046.759	0	0	252.445.533	304.945	0,001
KtMalang	2004	9.576.649	0	0	272.391.682	319.138	0,001
KtMalang	2005	10.117.905	0	0	301.091.461	390.736	0,001
KtMalang	2006	10.719.948	0	0	371.818.222	372.062	0,001
KtProbolinggo	2002	1.303.697	1	0	48.797.085	75.156	3,442
KtProbolinggo	2003	1.357.064	1	0	111.964.145	77.562	4,274
KtProbolinggo	2004	1.432.822	1	0	126.199.733	78.319	4,745
KtProbolinggo	2005	1.517.236	1	0	144.903.001	100.716	5,207
KtProbolinggo	2006	1.618.792	1	0	220.826.326	95.913	5,477
KtPasuruan	2002	731.483	1	0	63.044.183	66.939	0,903
KtPasuruan	2003	765.629	1	0	117.593.116	68.999	0,896
KtPasuruan	2004	809.572	1	0	102.297.576	70.226	0,873
KtPasuruan	2005	856.746	1	0	113.245.682	88.014	0,842
KtPasuruan	2006	908.333	1	0	157.670.450	85.244	0,820
KtMojokerto	2002	793.516	0	0	44.086.920	47.530	0,008
KtMojokerto	2003	841.005	0	0	65.994.169	45.762	0,008
KtMojokerto	2004	894.777	0	0	60.672.074	47.940	0,008
KtMojokerto	2005	952.885	0	0	77.265.445	58.219	0,008
KtMojokerto	2006	1.017.148	0	0	130.967.448	61.145	0,008
KtMadiun	2002	773.497	0	0	108.388.360	61.660	0,013
KtMadiun	2003	811.974	0	0	241.427.644	62.808	0,013
KtMadiun	2004	858.174	0	0	131.993.025	67.303	0,013
KtMadiun	2005	911.163	0	0	87.743.416	80.559	0,012
KtMadiun	2006	968.278	0	0	59.043.326	83.626	0,012
KtSurabaya	2002	50.942.757	1	0	247.917.304	1.141.444	0,148
KtSurabaya	2003	53.125.900	1	0	801.536.360	1.159.388	0,138
KtSurabaya	2004	56.312.932	1	0	1.013.874.704	1.156.234	0,133
KtSurabaya	2005	59.877.994	1	0	1.175.740.014	1.442.938	0,126
KtSurabaya	2006	63.678.350	1	0	1.684.858.753	1.385.559	0,122
Pandeglang	2002	2.919.599	0	1	60.688.508	407260	4,016
Pandeglang	2003	3.052.872	0	1	217.173.942	400917	4,017
Pandeglang	2004	3.211.070	0	1	216.944.286	380022	3,961
Pandeglang	2005	3.366.088	0	1	230.628.416	412802	3,934
Pandeglang	2006	3.499.224	0	1	381.458.286	385147	4,191
Lebak	2002	2.943.834	0	1	75.831.883	397295	0,701
Lebak	2003	3.046.905	0	1	228.146.951	423907	0,844
Lebak	2004	3.170.531	0	1	224.232.350	422429	0,951
Lebak	2005	3.289.215	0	1	274.980.864	431082	0,957
Lebak	2006	3.380.217	0	1	420.046.415	445480	1,152
Tangerang	2002	13.573.716	1	0	241.555.356	1103356	0,943

Tangerang	2003	14.175.745	1	0	588.567.860	1114997	0,963
Tangerang	2004	15.083.123	1	0	578.817.440	1083072	0,969
Tangerang	2005	16.186.460	1	0	710.664.461	1294902	0,934
Tangerang	2006	17.314.266	1	0	1.165.877.862	1253852	0,943
Serang	2002	7.020.648	1	0	74.863.665	576746	1,605
Serang	2003	7.317.284	1	0	381.751.506	605432	1,611
Serang	2004	7.638.401	1	0	399.162.077	618386	1,580
Serang	2005	7.973.371	1	0	405.773.894	625131	1,546
Serang	2006	8.357.680	1	0	638.590.526	590040	1,623
KfTangerang	2002	17.984.150	0	0	191.168.985	529045	0,000
KfTangerang	2003	19.224.896	0	0	363.135.845	523716	0,000
KfTangerang	2004	20.332.135	0	0	410.407.369	545708	0,000
KfTangerang	2005	21.721.165	0	0	417.440.208	577034	0,000
KfTangerang	2006	23.214.922	0	0	632.242.275	543793	0,000
KtCilegon	2002	7.720.263	1	0	101.192.480	97584	0,066
KtCilegon	2003	8.281.368	1	0	152.693.391	107673	0,065
KtCilegon	2004	8.886.737	1	0	152.680.955	112353	0,064
KtCilegon	2005	9.440.708	1	0	204.593.072	120557	0,063
KtCilegon	2006	9.972.372	1	0	271.885.992	115183	0,061

Lampiran 2. Hasil Pengujian OLS

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/02/08 Time: 02:44

Sample: 2002 2006

Included observations: 5

Cross-sections included: 104

Total pool (balanced) observations: 520

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.841207	0.798951	4.807813	0.0000
LOG(PEM?)	0.235398	0.044794	5.255158	0.0000
LOG(TK?)	0.531127	0.048428	10.96734	0.0000
RPRIK?	-0.036200	0.010982	-3.296181	0.0010
R-squared	0.341472	Mean dependent var		15.15606
Adjusted R-squared	0.337643	S.D. dependent var		0.885208
S.E. of regression	0.720429	Akaike info criterion		2.189723
Sum squared resid	267.8133	Schwarz criterion		2.222445
Log likelihood	-565.3280	F-statistic		89.18842
Durbin-Watson stat	0.053565	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3. Hasil Pengujian dengan Metode *dummy*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/02/08 Time: 02:42

Sample: 2002 2006

Included observations: 5

Cross-sections included: 104

Total pool (balanced) observations: 520

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.590947	0.770053	4.663244	0.0000
D1?	0.486718	0.081376	5.981082	0.0000
D2?	-0.074842	0.086236	-0.867878	0.3859
LOG(PEM?)	0.229856	0.042952	5.351426	0.0000
LOG(TK?)	0.552739	0.047020	11.75534	0.0000
RPRIK?	-0.079272	0.012639	-6.272189	0.0000
R-squared	0.397111	Mean dependent var		15.15606
Adjusted R-squared	0.391246	S.D. dependent var		0.885208
S.E. of regression	0.690663	Akaike info criterion		2.109141
Sum squared resid	245.1858	Schwarz criterion		2.158224
Log likelihood	-542.3768	F-statistic		67.71219
Durbin-Watson stat	0.058111	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 4. Hasil Pengujian dengan Menggunakan Metode Variabel *Dummy*

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/02/08 Time: 02:39

Sample: 2002 2006

Included observations: 5

Cross-sections included: 104

Total pool (balanced) observations: 520

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.781243	1.080195	4.426278	0.0000
D1?	-2.797755	1.642693	-1.703152	0.0892
D2?	-8.774868	2.777907	-3.158806	0.0017
LOG(PEM?)	0.217009	0.057496	3.774355	0.0002
LOG(TK?)	0.482010	0.064359	7.489442	0.0000
R?	-0.185143	0.111240	-1.664353	0.0967
D1PEM?	0.195611	0.098041	1.995197	0.0466
D1TK?	-0.040168	0.101395	-0.396157	0.6922
D1RPRIK?	0.111665	0.111953	0.997423	0.3190
D2PEM?	-0.179362	0.111603	-1.607146	0.1086
D2TK?	0.930779	0.175952	5.289959	0.0000
D2R?	0.026923	0.130342	0.206557	0.8364
R-squared	0.438893	Mean dependent var		15.15606
Adjusted R-squared	0.426743	S.D. dependent var		0.885208
S.E. of regression	0.670224	Akaike info criterion		2.060396
Sum squared resid	228.1934	Schwarz criterion		2.158561
Log likelihood	-523.7029	F-statistic		36.12305
Durbin-Watson stat	0.083627	Prob(F-statistic)		0.000000